

**PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN DI DESA PEMBUANG HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi



Oleh

**MIFTAHUL KHAIRI**

**NIM. 150 412 0459**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2019 M / 1440 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
DI DESA PEMBUANG HULU**

NAMA : **MIFTAHUL KHAIRI**

NIM : **1504120459**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JURUSAN : **EKONOMI ISLAM**

PROGRAM STUDI : **EKONOMI SYARIAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui

Pembimbing I



Ali Sadikin, M.Si

NIP.197402011999031002

Pembimbing II



Nur Fuad Rahman, M.Pd

NIP.199112032018090222

Mengetahui,

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si

NIP.196311091992031004

Ketua Jurusan

Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si

NIP.1984032120110110212

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Oktober 2019

**Saudara Miftahul Khairi**

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

**IAIN PALANGKA RAYA**

Di-

Palangka Raya

*Assalammualaikum Wr. Wb*

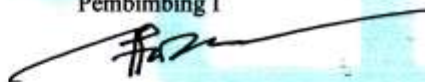
Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara :

NAMA : MIFTAHUL KHAIRI  
NIM : 1504120459  
JUDUL : **PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
DI DESA PEMBUANG HULU**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

*Wassalammualaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



Ali Sadikin, M.Si

NIP.197402011999031002

Pembimbing II



Nur Fuadi Rahman, M.Pd

NIP.199112032018090222

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PEMBUANG HULU** oleh Miftahul Khairi NIM: 1504120459 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : jum'at

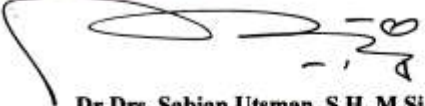
Tanggal : 25 Oktober 2019

Palangka Raya 25 Oktober 2019

**Tim Penguji**

- |  |  |
|--|--|
| 1. <b><u>Muhammad Noor Savuti, M.E</u></b><br>Ketua Sidang   | (.....<br>  |
| 2. <b><u>Jelita, M.Si</u></b><br>Penguji Utama/I             | (.....<br> |
| 3. <b><u>Ali Sadikin, M.Si</u></b><br>Penguji II             | (.....<br> |
| 4. <b><u>Nur Fuadi Rahman, M.Pd</u></b><br>Sekretaris Sidang | (.....<br> |

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si**  
NIP. 196311091992031004

## **PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PEMBUANG HULU**

### **ABSTRAK**

**Oleh : Miftahul Khairi  
1504120459**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan keberlanjutan dari PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, banyak masyarakat lebih memilih mengajukan pinjaman di UPK, untuk tambahan modal usaha, dan ataupun membuka usaha baru, padahal di desa Pembuang Hulu juga terdapat lembaga keuangan bank yaitu bank BRI dan bank Kalteng, yang sama-sama juga memfasilitasi masyarakat untuk usaha UMKM, atau di kenal dengan istilah KUR (Kredit usaha rakyat) . Rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Peran keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ? Bagaimana dampak keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ? Bagaimana kendala dan solusi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa pembuang hulu ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian di desa pembuang hulu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Dalam menganalisis data ini, teknik analisis data yang di gunakan penelti adalah model analisis *Field Research* metode kualitatif deskriptif.

Hasil dari Penelitian ini dari wawancara dan observasi bahwa, Peran program UPK berdampak langsung terhadap masyarakat desa Pembuang Hulu, khususnya pengusaha kecil UMKM, dengan adanya upk dapat membantu dalam hal permodalan dan tambahan modal, untuk menjalankan sebuah usaha, jenis-jenis usaha yang dibiayai oleh UPK adalah usaha tukang jahit, usaha budi daya ikan nila, usaha petani (pembeli) buah sawit, dan usaha warung sembako, dihubungkan pada analisis *Field Research* dengan metode kualitatif, maka banyak masyarakat yang lebih memilih mengajukan pinjaman di UPK karena menurut penilaian mereka mengajukan pinjaman di UPK tidak terlalu di persulit berbelit-belit dalam hal persyaratannya, asal ada Jaminan, Ktp, dan Kartu keluarga, sudah dapat mengajukan pinjaman. Lebih mudah di dibandingkan pengajuan KUR (kredit usaha rakyat) di lembaga bank, bank Bri, dan bank Kalteng yang harus memakai surat ijin usaha.

**Kata Kunci :Peran, perekonomian desa**

**ROLE OF ACTIVITIES MANAGEMENT UNITS (UPK) IN INCREASING THE  
ECONOMY IN THE UPDATER VILLAGE**

**ABSTRACT**

**By: Miftahul Khairi  
1504120459**

*The Activity Management Unit (UPK) is a continuation of the National PNPM Community Empowerment Program, many people choose loans at UPK, to increase business capital, and also open new businesses, whereas in the village of Pembuang Hulu it is also related to bank financial institutions namely BRI and Kalteng banks, which both also facilitate the community for MSME businesses, or are known as KUR (People's Business Credit). The formulation of the problem as follows, What is the Role Related to the Activity Management Unit (UPK)? How to influence the Activity Management Unit (UPK)? How to improve and solution the Activity Management Unit (UPK) in improving the economy of upstream waster villages?*

*The purpose of this study was to study the role of the Activity Management Unit (UPK) in improving performance in the upstream waster village. This research method uses qualitative study. Data collection was carried out using interview, collection and collection techniques. The sampling technique uses purposive sampling technique. Validation of data is done by using triangulation. In analyzing this data, the data analysis technique used by the researcher is the Field Research model of qualitative analysis.*

*The results of this study from the interviews and observations, The role of the UPK program has a direct impact on the village community of Pembuang Hulu, especially small MSME entrepreneurs, with the presence of UPK can help in terms of capital and additional capital, to help businesses, types of businesses financed by UPK is a tailor business, tilapia aquaculture business, farmer (buyer) business of oil palm fruit, and staple food business, supported in the field research analysis with qualitative methods, so many people prefer the loan requested at UPK because it is in accordance with what they want loans in UPK do not need to be complicated in terms of the requirements, as long as there are collateral, ID cards, and family cards, loans can already be requested. It is easier to compare the submission of KUR (people's business credit) in the institutions of banks, Bri banks, and Central Kalimantan banks that must use a business permit.*

**Keywords:** *Role, village economy*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul **“PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PEMBUANG HULU”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh Karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Enrico Tedja Sukmana, M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

4. Bapak alm Dr. H. Jirhanuddin, M,Ag selaku dosen pembimbing akademik penulis.
5. Bapak Fuad Muhajirin Farid, M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis.
6. Bapak Ali Sadikin, M.Si selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Nur Fuadi Rahman, M.Pd selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan luar biasa, nasehat, serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
9. Terimakasih banyak kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, mengkuliahkan saya, memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan kuliah, karena dari kedua orang tua saya, saya bisa seperti ini.
10. Semua teman-teman Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2015 kelas A,B dan C khususnya para sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan sahabat saya yang selalu membantu saya dan berjuang bersama selama kuliah. Teman-teman saya yang di kampung halaman membantu saya selama penelitian.



11. Terimakasih banyak kepada kaka Kandung saya Elda Miyanti, S.Pd yang telah memberikan semangat dan memberikan ilmunya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih banyak kepada seluruh keluarga saya yang telah memberi semangat untuk saya agar saya bisa meraih cita-cita saya.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin ya Robbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis,

**Miftahul Khairi**

**NIM. 1504120459**

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Desa Pembuang Hulu** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



**Miftahul Khairi**  
NIM.1504120459

## MOTTO

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Barang Siapa beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, maka hedaklah ia berkata baik-baik atau diam”(HR. Al-Bukhari dan Muslim)



## PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada

- Untuk ayah saya Sandin dan Ibu saya Maryana tercinta yang selalu memberikan doa restu dan pengorbanan segalanya demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Dengan harapan yang besar ayah dan ibu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun material demi menghantarkan anak-anaknya pada pintu kesuksesan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan keselamatan dunia dan akherat. Aamiin.
- Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi terkhusus kepada kaka saya Elda Miyanti, S.Pd yang selalu membantu dan memberikan masukan dalam mengerjakan skripsi, sehingga dapat terselesaikan.
- Teman-teman dan sahabat saya seperjuangan ESY A, B dan C dengan semua kenangan yang kita ukur selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya, semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin silaturahmi diantara kita semua. Aamiin
- Dan untuk kampus ku tercinta IAIN Palangka Raya kampus yang dimana banyak memberikan pengalaman, ilmu dan teman yang menginspirasi buat saya jayalah kampus tercinta ku IAIN Palangka Raya, terdepan unggul dan terpercaya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Śād</i>	Ś	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah

ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللَّهِمَّة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

#### D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>



## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

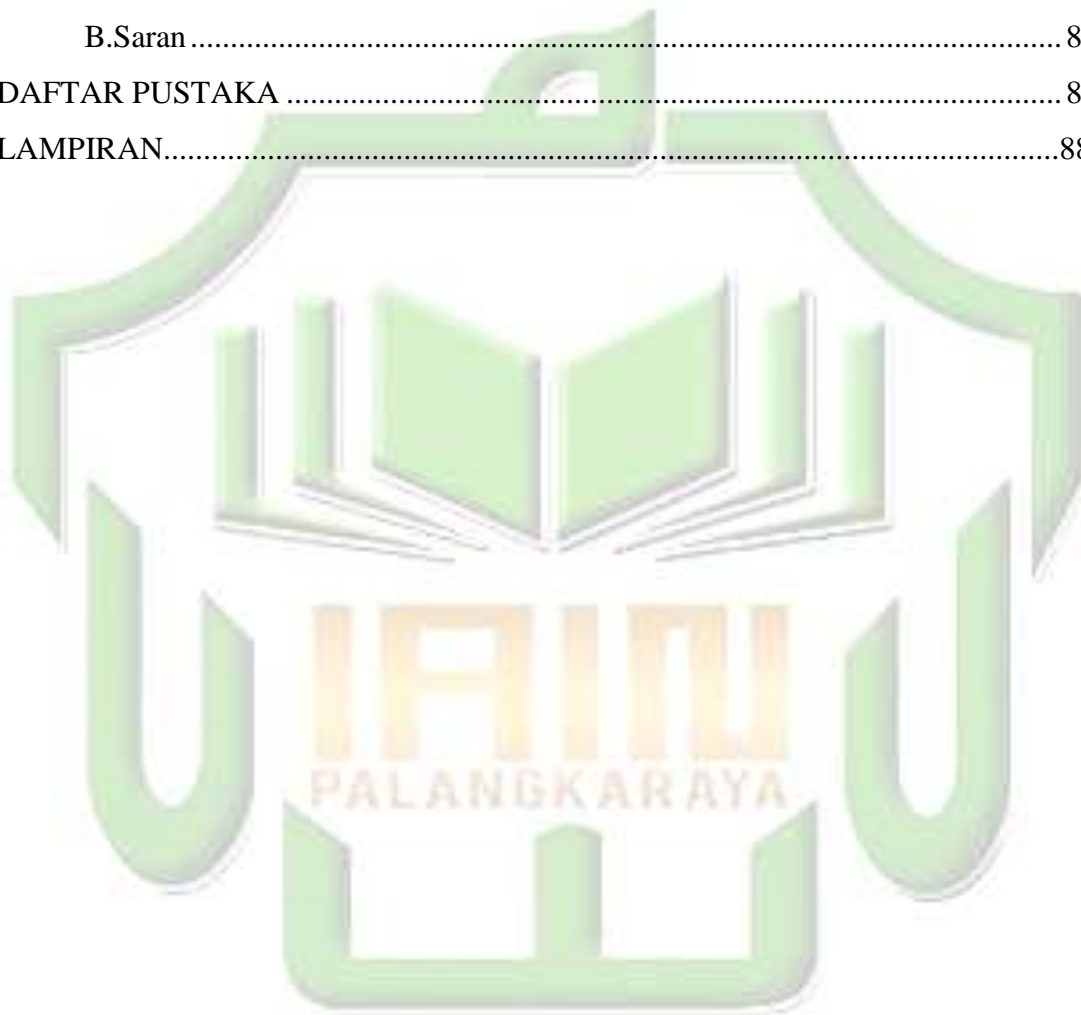


## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
NOTA DINAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ix
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR BAGAN .....	xxi
DAFTAR SINGKATAN .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	5
C.Tujuan Penelitian .....	5
D.Manfaat Penelitian .....	6
E.Batasan Masalah .....	6
F.Sistematika Penulisan .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	8
A.Penelitian Terdahulu .....	8
B.Kajian Teori .....	14
1.Pengertian Peran .....	14

2. Pengertian kredit Simpan Pinjam .....	16
3. Teori Peningkatan Perekonomian Perdesaaan.....	20
4. Sistem Ekonomi Kerakyatan .....	23
C. Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	31
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
D. Teknik Pengelolan Data .....	34
E. Pengabsahan Data.....	37
F. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
1. Desa Pembuang Hulu .....	39
2. PNPM Mandiri Perdesaaan .....	42
3. Sejarah Singkat Unit Pengelola Kegiatan (UPK).....	46
a. Struktur Organisasi .....	48
b. Prosedur Pinjaman Dana Simpan Pinjam yaitu:.....	49
c. Jenis-jenis Usaha Yang Dibiaya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) .....	50
B. Pemaparan Data.....	52
1. Peran keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa Pembuang Hulu .....	52
2. Dampak keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian Desa Pembuang Hulu .....	56
3. Kendala dan Solusi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian Desa Pembuang Hulu .....	65
C. Analisis Penelitian .....	68
1. Peran keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa Pembuang Hulu .....	68

2. Dampak keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa Pмбуang Hulu .....	76
3. Kendala dan Solusi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa Pмбуang Hulu .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>88</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan penelitian.....	12
Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Anggota dan Pinjaman.....	49



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 2 Kerangka Pikir.....	33
Bagan 4.1 Struktur Organisasi.....	47



## DAFTAR SINGKATAN



H	:	Halaman
No	:	Nomor
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
UPK	:	Unit Pengelola Kegiatan
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
Rp	:	Rupiah
%	:	Persen
SWT	:	Subhaanahuwata'aala
SAW	:	Sallallaahu'alaihiwassalam
BPP	:	Badan Penelitian dan Pengembangan
FEBI	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
ESY	:	Ekonomi Syariah
Q.S	:	Quran Surah
Kec.	:	Kecamatan
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

AD	:	Anggaran Dasar
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ADD	:	Alokasi Dana Desa
ART	:	Anggaran Rumah Tangga
BKAD	:	Badan Kerjasama Antara Desa
RAB	:	Rencana Anggaran Biaya





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak melibatkan peran pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Tidak juga di negara yang menganut sistem kapitalis yang menghendaki peran swasta lebih dominan dalam mengelola perekonomiannya.<sup>1</sup> Perekonomian kota Palangka Raya telah mencatat pertumbuhan yang kuat selama beberapa tahun terakhir juga di sertai inflasi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dan proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stake holder, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI), Wuryanto, menyampaikan ditengah kondisi perekonomian global yang tidak kondusif, secara umum perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2018 berada pada level yang cukup baik. Bahkan sebut dia, pertumbuhan ekonomi Kalteng triwulan III 2018 meningkat sebesar 6,48 persen dari tahun ketahun, dari 5,66 persen pada triwulan II 2018. Pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Di akses dari <http://www.kompasiana.com/ratudevi/550ea7e5a33311ae2dba81bb/peranan-pemerintah-dalam-perekonomian>. Pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 14:30 WIB

ekonomi provinsi kalimantan tengah, lebih tinggi dari seluruh provinsi di Kalimantan dan pertumbuhan nasional.<sup>2</sup>

Kabupaten Seruyan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang juga mengalami peningkatan perekonomian pada satu tahun terakhir, berdasarkan data BPS ( Badan Pusat Statistik ) Kabupaten Seruyan. Khususnya di Kecamatan Hanau yang terdiri dari 7 desa, yaitu desa Derangga, Pembung Hulu I, Pembunag Hulu II, Bahaur, Parang Batang, Paring Raya, dan desa Tanjung Hanau. Dengan jumlah penduduk 22.141 jiwa Kecamatan Hanau merupakan salah satu kecamatan yang strategis di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan menjamin kemudahan intraksi dengan wilayah lainnya, berpotensi sebagai pemasok kebutuhan wilayah dan penggunaan hasil produk wilayah dan mendukung berjalannya kegiatan ekonomi wilayah regional. Disamping selain mempunyai lokasi yang cukup strategis, Kecamatan Hanau merupakan kecamatan yang kaya akan sumber daya alam, perkebunan dan potensi lahan yang sesuai untuk tanaman pangan.<sup>3</sup>

Pembangunan meniscayakan transformasi struktural dalam segala kehidupan, baik perubahan kultural, politik, sosial, ekonomi maupun yang lainnya.<sup>4</sup>Program pembangunan yang di laksanakan dengan mekanisme

---

<sup>2</sup>Di akses dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/amp/2018/12/18/pertumbuhan-ekonomi-kalteng-tertinggi-se-kalimantan>. Pada tanggal 10 april 2019 pukul 10:40 WIB

<sup>3</sup> Di akses dari <https://seruyankab.bps.go.id/publication/2018/10/11>. Pada tanggal 10 april 2019 pukul 10:40 WIB

<sup>4</sup> Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia*, Depok: PT. Raja grafindo 2018, h. 223

pelaksanaan yang bertumpu pada masyarakat, yaitu bantuan dapat di salurkan secara langsung kepada masyarakat. Dukungan juga di lakukan dengan pemberdayaan aparat dengan mengikut sertakan unsur-unsur swadaya masyarakat, lembaga masyarakat lainnya dan unsur perguruan tinggi yang menerapkan pembanguna berdasarkan prinsip pembangunan yang partisipatif.<sup>5</sup>

Pengembangan dan peran UMKM merupakan juga langkah penting dalam meningkatkan dan memperkuat sendi-sendi dasar perekonomian, penyediaan lapangan kerja dan pembentukan usaha-usaha baru khususnya daerah pedesaan. Di desa Pembuang Hulu terdapat lembaga keuangan bank dan program pengetasan kemiskinan yaitu bank BRI, bank Kalteng dan Program PNPM Mandiri Perdesan. Hal yang menarik menurut penulis amati di desa tersebut, yaitu PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan daerah pedesaan tingkat kecamatan atau kabupaten. Yang di kelola secara mandiri oleh perangkat desa, dari Program PNPM di bentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menjalankan usaha atau fungsi Simpan Pinjam, kredit usaha mikro UMKM. Banyak masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah UMKM yang menjadi anggota dari program ini dan mengajukan pinjaman kredit untuk tambahan modal usahanya. Padahal bank Kalteng dan bank BRI juga menyediakan pelayanan

---

<sup>5</sup> Cornelis Rintuh, Miar, *Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005, h.88

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sasaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha termasuk koperasi dan BPR. Dengan jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun dan dapat di perpanjang menjadi 4 tahun, di bandingkan dengan Program PNPM Mandiri Perdesaan yang membatasi jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun saja. Jika dilihat dari segi limit pinjaman lebih kecil di bandingkan dengan bank yang limit nya lebih besar, untuk kredit UMKM dan jika di lihat dari segi jarak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lebih jauh lokasi nya dengan permukiman masyarakat. Dapat di ketahui jumlah anggota UPK pada tahun 2018 berjumlah 482 anggota sedangkan di lembaga bank jumlah nasabah yang melakukan pinjaman KUR (kredit usaha rakyat), untuk usaha UMKM pada tahun 2018 berjumlah 389 kelompok usaha. Pengajuan pinjaman di UPK lebih mudah dan tidak di persulit dalam pinjaman, asalkan ada KTP, KK, dan Jaminan sudah dapat mengajukan pinjaman. Jika terjadi tunggakan jatuh tempo pembayaran angsuran anggota, pihak UPK tidak langsung melelang jaminan melainkan melakukan kesepakatan kembali dengan cara musyawarah.

Salah satu peran fungsi Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang meningkatkan perekonomian di desa Pembuang Hulu adalah budidaya ikan nila, menurut informasi yang saya dapat bapak Heldiyani merupakan salah satu anggota yang menjalankan usaha ini, yang terbantu usahanya dengan adanya kredit simpan

pinjam UMKM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai modal untuk menjalankan usahanya.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, penulis melakukan penelitian pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan tersebut dan menunagkannya dalam judul “ **PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PEMBUANG HULU**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa pembuang hulu ?
2. Bagaimana dampak keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa pembuang hulu ?
3. Bagaimana kendala dan solusi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa pembuang hulu ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Peran keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa pembuang hulu.

---

<sup>6</sup>Observasi awal, dengan Heldiyani di Pembuang Hulu, 20 Januari 2019.

2. Untuk mengetahui dampak keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa pembuang hulu.
3. Untuk mengetahui isolasi dan kendala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa pembuang hulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengembangan keilmuan penulis selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas IAIN Palangka Raya.
2. Sebagai sumber referensi dan pengembang keilmuan dalam penelitian selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### **E. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi oleh sebab itu penelitian yang diangkat perlu dibatasi, penulis membatasi diri hanya membahas “Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Meningkatkan Perekonomian Di Desa Pembuang Hulu” Khususnya yang dimaksud dana simpan pinjam kredit UPK saja dari pandangan penulis dalam meneliti judul skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan ini, maka penulis memaparkan sistematika sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

**BAB II Kajian Teori** Penelitian yang dilakukan sebelumnya, gambaran umum PNPM Mandiri Perdesaaan, sejarah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Pembunag Hulu, dan deskripsi teori peran, teori simpan pinjam kredit, ekonomi kerakyatan, dan kerangka pikir penulis.

**BAB III Metode Penelitian** Dalam bab ini berisi tentang rancangan atau rencana penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang termasuk ke dalam bagian ini yaitu, waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengelola data, pengabsahan data dan analisis data.

**Bab IV Hasil dan Analisis** Penulis membahas tentang Hasil dan Analisis. Dalam bab ini akan di uraikan beberapa pembahasan atau hasil penelitian.

**Bab V Kesimpulan** Berisi penutup hasil kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini, dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Pembuang Hulu.”, dengan merujuk kajian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian dilakukan oleh **Safrizal** (2013) dengan judul “*Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Desa Mengkopot Kecamatan Merbau*”<sup>7</sup> Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana prosedur penyaluran dana simpan pinjam PNPM Mandiri kepada desa Mengkopot, Bagaimana peranan PNPM Mandiri dalam meningkatkan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat setempat umumnya, Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap program simpan pinjam PNPM mandiri di desa Mengkopot.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program simpan pinjam PNPM mandiri di desa mengkopot sangat membantu anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya dalam memenuhi keperluan usaha maupun rumah tangga, namun simpan pinjam PNPM mandiri di desa mangkopot belum bisa sepenuhnya membangun ekonomi masyarakat desa mongkopot, hal ini di karenakan masih banyak dana simpan pinjam yang di salurkan tidak digunakan

---

<sup>7</sup> Safrizal, *Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Desa Mengkopot Kecamatan Merbau*, Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013 h.1.



semestinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika dilihat dari system simpan pinjam PNPM mandiri desa mongkopot sangat bertentangan dengan system ekonomi syariah, hal ini karena adanya system bunga yang di terapkan pada simpan pinjam tersebut.

Penelitian dari **Sri Romandoni** (2011) dengan judul "*Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Pemberian kredit Mikro dan Perannya Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan di Kecamatan Winong Kabupaten Pati Priode 2009*".<sup>8</sup>Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana profil usaha kecil mikro di Kecamatan Winong, Bagaimana implementasi Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberian kredit mikro terhadap program pengetasan kemiskinan di Kecamatan Winong, Bagaimana peranan Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberian kredit mikro terhadap program pengetasan kemiskinan di Kecamatan Winong, Kendala-kendala apa saja yang di hadapi PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberian kredit mikro terhadap program pengetasan kemiskinan di Kecamatan Winong.

Hasil penelitian ini di peroleh bahwa secara deskriptif persentase untuk ketepatsasaran implementasi PNPM MD termasuk dalam kategori tepat dengan rata-rata sebesar 72,71 %, sedangkan kendala yang di hadapi pengurus yang

---

<sup>8</sup> Sri Romandoni, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Pemberian kredit Mikro dan Perannya Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan di Kecamatan Winong Kabupaten Pati Priode 2009*, Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2011, h.8.

enggan transparan dalam menjalankan program dan kurangnya SDM selain itu adanya kredit macet yang disebabkan karena masyarakat tidak tepat waktu dalam mengembalikan dana pinjaman.

Penelitian dari **Eliyanti** (2012) yang berjudul “ *Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*”<sup>9</sup>. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan kegiatan Penyaluran Dana Bergulir PNPM Mandiri di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa, Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa dalam kegiatan Penyaluran Dana Bergulir.

Hasil penelitian ini secara umum, menemukan bahwa program PNPM Mandiri di desa kebuyutan sudah di jalankan denagan baik. Program yang dijalankan meliputi dana yang bergulir. Program penyaluran dana hanya sebagian kecil yang betul-betul bisa di manfaatkan oleh warga miskin. Terkait dengan PNPM Mandiri bagi kesejahteraan, kegiatan PNPM Mandiri yang berbentuk dana bergulir di rasa masih kurang membantu perekonomian masyarakat, karena dana yang dikucurkan berjumlah sedikit sementara kebutuhan masyarakat untuk modal usaha berjumlah besar, sehingga belum mampu memberikan perubahan kesejahteraan yang mendasar dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Eliyanti, *Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*, Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012, h.1.

Penelitian dari **Wahdiah** (2013) yang berjudul “*Pengendalian piutang pada Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengendalian piutang pada Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bahaur Kabupaten Banjar, Bagaimana tingkat keberhasilan pengendalian piutang Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK adalah sistem tanggung renteng dengan saksi lokal untuk menghindari kredit macet. Adapun untuk kolektibilitas piutangnya selama tiga tahun terakhir persentase kategori kolektibilitas lancar sebesar 84,52 % dengan rata-rata *neoperforming loan* sebesar 9% persentase ini menunjukkan bahwa piutang selama tiga tahun terakhir dapat dikatakan cukup baik dan dapat dikatakan berhasil sesuai tujuan Program PNPM-Mpd.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wahdiah, 'Pengendalian piutang pada Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2013, h. 5

Kesimpulan pernyataan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, penelitian ini lebih fokus pada peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian di desa Pembuang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan. Persamaan dan perbedaan penelitian di uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul, Jenis penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>Safrizal</b>	Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Desa Mengkopot Kecamatan Merbau	Mengkaji tentang peran Program PNPM atau UPK dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa	Terkhususnya kepada Masyarakat desa mongkopot kecamatan merbau dalam peranan program PNPM membangun perekonomian di desa tersebut.
<b>Sri Romandoni</b>	Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Pemberian kredit Mikro	Mengkaji tentang peran Program PNPM atau UPK dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa	Terkhususnya mengkaji untuk mengetahui implementasi atau penerapan dan pemberian kredit mikro program PNPM dalam pengetasan kemiskinan

	dan Perannya Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan di Kecamatan Winong Kabupaten Pati Priode 2009		
<b>Eliyanti</b>	Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	Mengkaji tentang peran Program PNPM atau UPK dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa	Terkhususnya di desa kebuyutan kecamatan tirtayasa kabupaten serang dalam meningkatkan taraf kesejahteraan
<b>Wahdiah</b>	Pengendalian piutang pada Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan	Mengkaji tentang Program PNPM	Terkhusus pada tingkat keberhasilan pengendalian piutang di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Sumber: dibuat Oleh Peneliti 2019

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Peran

Biddle dan thomas menyepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan ‘lakon’ oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap *scrit* (semacam skenario), intruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat, dan reaksi umum penonton, serta di pengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku sosialpun mengalami hal yang hampir sama.

Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial di masyarakat. Dalam hal ini seseorang individu juga harus patuh pada skenario, yang berupa norma sosial, tuntunan sosial dan kaidah-kaidah.<sup>11</sup>

Dari pengertian diatas dapat didefenisikan bahwa kata peran adalah kedudukan seseorang, lembaga ataupun non lembaga dalam suatu situasi atau peristiwa tertentu yang terjadi di kehidupan masyarakat dengan mewujudkan tindakan-tindakan atau aktivitas yang memiliki arti penting demi mencapai suatu tujuan tertentu.

---

<sup>11</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, h. 7

Beberapa pengertian peran menurut para ahli, sebagai berikut :

1) Suhardono

Pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.

2) Poerwadarminta

Pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

3) Soekanto

Arti peran adalah suatu pekerjaan yang di lakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang di sandang.

Jenis-jenis peran, dapat di bagi menjadi tiga jenis, adalah sebagai berikut :

- 1) Peran aktif, adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi.
- 2) Peran partisipatif, adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- 3) Peran pasif, adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu, artinya peran pasif hanya di pakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Di akses dari <https://www.maxmonroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> pada tgl 27 Oktober 2019 10:11 Wib

## 2. Pengertian kredit Simpan Pinjam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pinjaman berarti sesuatu yang di pinjam (*barang, uang dan sebagainya*).<sup>13</sup> Kata Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Pengertian kredit menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 yaitu, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak satu (bank) dengan yang lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Adapun menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya

---

<sup>13</sup> Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko Surabaya, 2013, h.



setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil ke untung.<sup>14</sup>

#### a) Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sulit untuk terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.
- 2) Waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis *Finace* khususnya oleh analis kredit. Ini dapat di mengerti karena bagi pihak kreditur saat ia menyerahkan uang kepada debitur maka juga harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri, yaitu limit waktu yang disepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- 3) Risiko (*degree of risk*), yang paling dikaji adalah pada keadaan yang paling terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak dapat kembali atau timbulnya kredit macet. Sehingga dengan begitu timbulah penempatan jaminan (*callateral*) dalam pemberian kredit.

---

<sup>14</sup>Irham Fahni, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2014. h. 2-3

- 4) Prestasi, yang dimaksud disini ialah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang tetapi bisa juga dalam bentuk barang dan jasa.
- 5) Adanya kreditur adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada orang lain.
- 6) Debitur adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa yang berkomitmen untuk mampu mengembalikannya.

#### **b) Kredit menurut jangka waktu**

Kredit berdasarkan menurut jangka waktu adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit jangka pendek, kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya satu tahun, atau maksimal satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, kredit ini memiliki jangka lebih dari 3 (tiga) tahun.

#### **c) Kredit berdasarkan jaminan**

Kredit berdasarkan jaminan adalah sebagai berikut :

- 1) Jaminan kebendaan bersifat tangible, ini terdiri dari benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor dan lain-lain dan maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lain-lainnya.

2) Jaminan perseorangan, yaitu kredit yang jaminannya di jamin oleh seseorang atau badan di mana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kreditur tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat waktunya

**d) Kredit menurut jangka waktu**

Kredit berdasarkan menurut jangka waktu adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit jangka pendek, kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya satu tahun, atau maksimal satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, kredit ini memiliki jangka lebih dari 3 (tiga) tahun.<sup>15</sup>

Kredit adalah sesuatu yang di bayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Seperti seseorang membeli mobil disebuah dealer dengan uang muka 10% dan sisanya di bayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan di bayar satu kali selama sebulan. Menurut Anwar Iqbal Qureshi menegaskan bahwa Islam melarang pembungaan uang, tetapi tidak berarti Islam melarang perkreditan, sebab menurut Qureshi bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Pinjaman atau hutang dapat dibagi kedalam dua jenis:

---

<sup>15</sup> Ibit. 6-11

- 1) Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) Pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.<sup>16</sup>

### 3. Teori Peningkatan Perekonomian Perdesaaan

TAP MPR II/MPR/1998 tentang garis-garis haluan negara pada Bab IV

Pola umum pembangunan lima tahun kelima menyatakan bahwa :

“Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengerahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya”. Pembangunan masyarakat desa lebih dititik beratkan pada:

- 1) Pengembangan kemampuan sumber daya manusia sebagai salah satu potensi di desa. Potensi tersebut harus lebih diperhatikan untuk dibina dan ditingkatkan serta dikembangkan sehingga masyarakat desa berkemampuan untuk berprakarsa serta memperbaiki dirinya sendiri, maupun untuk kepentingan masyarakat di desa untuk dapat tumbuh dan

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002. h. 301-303

berkembang, yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan kesejahteraannya.

- 2) Penciptaan iklim yang mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan untuk mengali dan memanfaatkan sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 3) Peningkatan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi, mengolah dan memasarkannya, sehingga dapat memberikan peluang untuk memberikan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Adapun langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut :

- 1) Memantapkan koordinasi dan keterpaduan semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan masyarakat desa, terutama dalam rangka meningkatkan keswadayaan keterampilan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perorangan maupun kelompok masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesempatan kerja di pedesaan.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan lembaga masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial, sehingga mampu secara swadaya menciptakan lapangan kerja dan berusaha.

- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kader-kader pembangunan desa, agar berperan sebagai motor penggerak pembangunan masyarakat desa.
- 5) Menciptakan iklim yang mendorong tumbuh dan berkembang prakarsa dan swakarsa masyarakat untuk mampu memproduksi dan memasarkan hasil produksi pedesaan.
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan penggunaan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta efisiensi pengolahan hasil produksi desa sehingga dapat meningkatkan produksi dan pemasarannya.
- 7) Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan masyarakat desa.<sup>17</sup>

“Desa” dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa orientasi pelaksanaan pembangunan dititik beratkan diwilayah pedesaan. Desa pengertiannya adalah sebagai unit pemerintah terkecil, termasuk didalamnya pengertian kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1979. Makmur dalam pengertian ini dilihat dalam makna operasional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat desa lahir batin yang dicerminkan dengan terpenuhnya :

- 1) Kebutuhan pokok, baik jumlah maupun mutu terjamin.

---

<sup>17</sup> Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet 1, 1991, h.54-57

- 2) Lapangan kerja terbuka luas, yang dimotori oleh kemampuan masyarakat sendiri untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
- 3) Aktivitas dan kemampuan ekonomi masyarakat, sudah semakin luas dan meningkat karena pengolahan maupun pemasaran hasil-hasilnya makin mantap.
- 4) Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang makin baik.
- 5) Rasa aman, tentram dan tertib masyarakat semakin luas dan meningkat.<sup>18</sup>

#### **4. Sistem Ekonomi Kerakyatan**

Pada dasarnya sistem, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada rakyat yang lemah. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 sebelum di amandemen, semestinya sistem ekonomi kerakyatan harus menjadi landasan dalam setiap perumusan strategi pembangunan dan penetapan kebijakan ekonomi di Indonesia. Sasaran ekonomi fundamental pembangunan ekonomi tersebut, diantaranya :

- a. Pengurangan angka kemiskinan, jumlah pengangguran, dan ketimpangan.
- b. Peningkatan kesejahteraan rakyat.
- c. Pestabilan laju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan

Ekonomi rakyat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan,

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 89-90

pendidikan, dan kesehatan. Dengan perkataan lain ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan dilakukan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya beserta keluarganya. Dalam konteks permasalahan yang sederhana, ekonomi rakyat adalah strategi bertahan hidup dari rakyat miskin.

Menurut Mubyarto, ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri:

- 1) Dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar.
- 2) Dikelola dengan cara-cara swadaya.
- 3) Bersifat mandiri sebagai ciri khasnya.
- 4) Tidak ada buruh dan tidak ada majikan.
- 5) Tidak mengejar keuntungan.

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Dalam pengertian sistem sosial terkandung unsur:

- a) Tujuan bersama yang menciptakan berbagai kebiasaan, tradisi, kaidah dan aturan yang melembaga untuk melakukan usaha secara bersama.
- b) Seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama tersebut menciptakan pengikat yang mempersatukan anggota masyarakat dalam usaha bersama melalui cara-cara tertentu.



- c) Sikap dasar dan pengertian tentang hak dan kewajiban, yang membentuk pola tingkah laku dan tindakan individu maupun kelompok, satu terhadap yang lain.
- d) Otoritas, kepemimpinan, struktur kebiasaan untuk mengarahkan usaha bersama memilih atau menempatkan alternatif-alternatif bagi alat-alat yang dipergunakan dan mempersatukan seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama menggunakan alat-alat tersebut.

Sistem ekonomi kerakyatan tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila keempat Pancasila menyatakan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Di dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang menggambarkan sistem demokrasi ekonomi, ditegaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pengawasan pemerintah. Dalam Pancasila secara keseluruhan harus terus-menerus menjadi pedoman arah perilaku ekonomi bangsa dan warga bangsa dan menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi sebagai :

- a) Roda kegiatan ekonomi dapat digerakan oleh rangsangan dan moral.
- b) Ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi nasional dengan pelaksanaannya di daerah-daerah.
- c) Nasionalisme ekonomi.

d) Ada keseimbangan yang selaras, serasi dan seimbang dari perencanaan ekonomi nasional dengan pelaksanaannya di daerah-daerah.<sup>19</sup>

**a. Strategi yang mendukung pembangunan ekonomi**

Berikut ini adalah strategi dalam pembangunan ekonomi :

1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan terutama di arahkan dalam menciptakan kesempatan kerja produktif, pengembangan kapasitas infrastruktur , dan peningkatan kegiatan ekonomi produktif rakyat.

2) Strategi Pengembangan UMKM

Dalam Sistem ekonomi kerakyatan, pengembangan industri pedesaan melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah stratejik dalam pembangunan bangsa.

3) Strategi Pengembangan Kawasan

Perbedaan laju pembangunan antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antara daerah. Konsep pengembangan kawasan andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Cornelis Rintuh, Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi rakyat*, Yogyakarta, Cet Pertama BPFE Yogyakarta, 2005. h.4-6

<sup>20</sup> Fahmy Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*, (Cet. I; Jakarta: Republika, 2008), h.187-194

## **b. Kebijakan Ketahanan dan Kedaulatan Ekonomi Nasional**

Manajemen ketahanan ekonomi nasional pada hakikatnya pengelolaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan ini paling tidak ditompang oleh tersedianya kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup yaitu sebagai berikut.

### 1) Tersedianya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat

Pekerjaan adalah sumber nafkah bagi masyarakat. Tanpa tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat, tentu akan berakibat pada sumber nafkah yang tidak juga memadai. Bila masyarakat banyak yang tidak dapat bekerja, atau menganggur maka hal ini akan menimbulkan berbagai masalah, tidak hanya masalah bagi yang bersangkutan (penganggur) saja, tetapi juga masalah bagi keluarga, masyarakat lingkungan dan negara secara keseluruhan.<sup>21</sup>

## **c. Sektor Usaha Kecil menengah**

Menurut Sutisno, pola pengembangan ekonomi kerakyatan harus diprioritaskan melalui keberpihakan kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Bagaimanapun, saat ini sektor UKM memegang peran penting yang sangat sentral dan strategis dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

---

<sup>21</sup> Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*, Padang, Akademi Permata, 2013. h.83.

Sektor UKM akan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan bisa diharapkan bangkitnya sektor rill di Indonesia.<sup>22</sup>



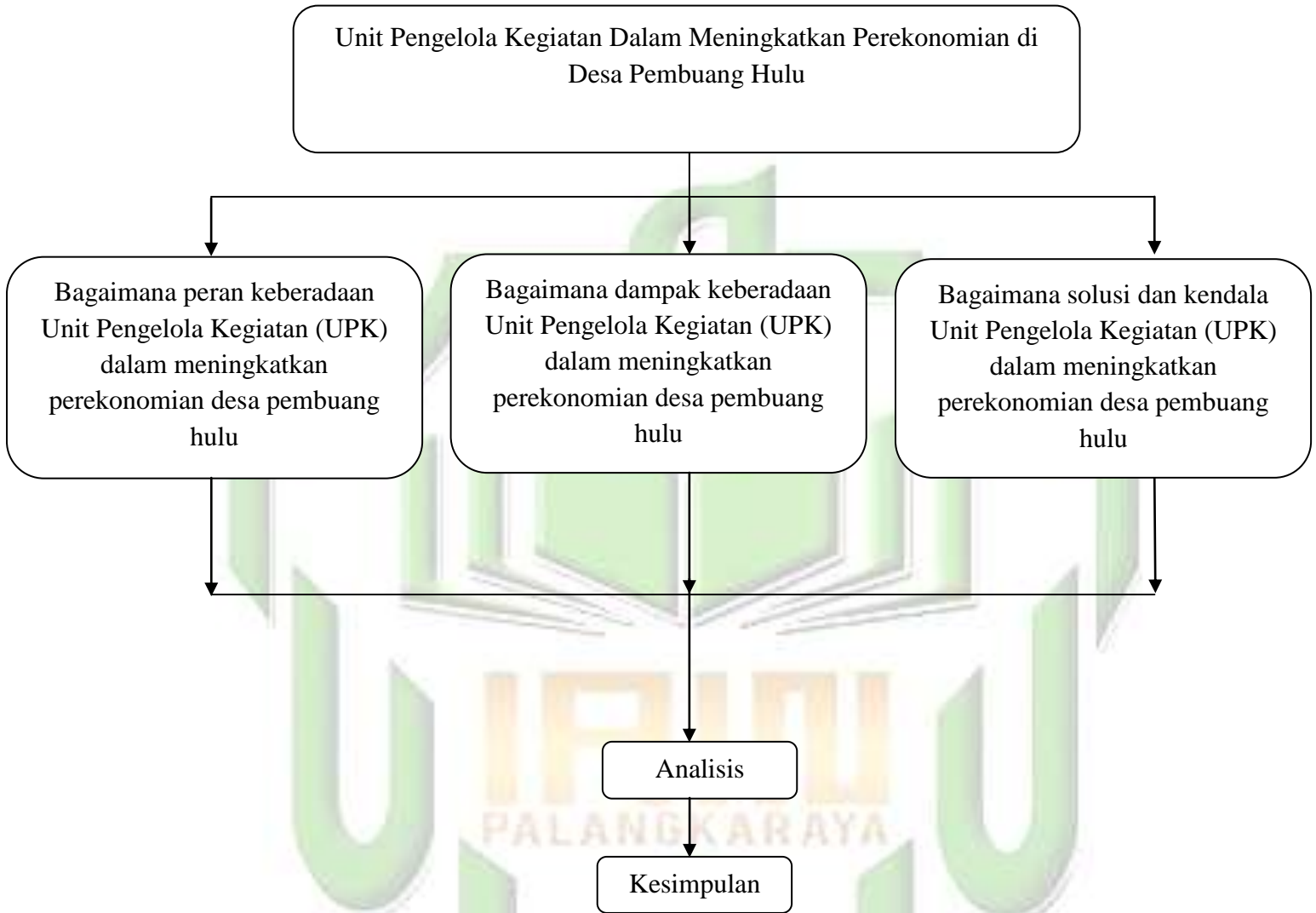
---

<sup>22</sup> Cornelis Rintuh, Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Cet. I; Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), h.182.

### **C. Kerangka Berpikir**

Dari judul “Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Pembuang Hulu” dimana program ini merupakan keberlanjutan dari program PNPM Mandiri Perdesaan yang dihentikan dan berjalan kembali, kemudian dalam tahap menjadi badan usaha milik desa yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang melayani kredit UMKM limit pinjaman lebih kecil daripada lembaga bank tapi masih banyak nasabah atau anggota yang mengajukan pinjaman, menurut informasi yang penulis dapat di mana perkembangan jumlah anggota unit pengelola kegiatan (UPK) di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, demikian juga jumlah dana yang di salurkan kepada anggota Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Maka tak salah Unit Pengelola kegiatan (UPK) juga sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian, khususnya daerah perdesaan.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### 1. Waktu penelitian

Penelitian ini selama 2 bulan, yakni sejak bulan Mei dan Juni 2019 sesuai dengan persetujuan yang peneliti ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Waktu selama dua bulan ini dianggap cukup untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga data-data yang diperoleh oleh peneliti tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

##### 2. Tempat penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berada di Desa Pembuang Hulu 1 Jl. Bakrie Entong No.150 Kecamatan Hanau Kabupaten seruyan. Adapun Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah program yang melayani jasa kredit simpan pinjam atau pinjaman pada anggotanya. Program ini khusus untuk daerah perdesaan di buat dan dirancang pemerintah sebagai sarana pengetasan kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell

mendefinisikan metode kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami sebuah masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal ini, maka peneliti mendeskripsikan secara sistematis dan akurat dengan dukungan data yang diperoleh di lapangan dan buku-buku ataupun dokumen yang berkaitan dengan Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan perekonomian atau yang sekarang dalam tahap menjadi badan usaha milik desa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Pembuang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013. H. 2-3

<sup>24</sup>Di akses dari <http://www.google.nl/amp/s/elpramwidya.wordpress.com/2009/12/25/teori-penelitian-deskriptif/amp/> Pada tanggal 21 agustus 2019 pukul 16:35 WIB



## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak pengelola UPK dan anggota atau nasabah, untuk dapat memberikan data primer untuk penelitian ini. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau persorangan seperti dari hasil wawancara atau kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Ridwan, *purposive sampling* dikenal dengan sampel pertimbangan ialah teknik sampel yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampel atau penentu sampel untuk tujuan tertentu. Penulis menulis pendapat pribadi dalam memilih individu-individu yang akan menjadi sampel. Ia memandang bahwa individu-individu tertentu saja yang dapat mewakili.<sup>25</sup>

Dengan ini peneliti menarik Pengelola dan anggota atau nasabah sebagai subjek penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Para nasabah atau anggota yang mengajukan pinjaman pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), di antaranya :
  - 1) Memiliki usaha produktif

---

<sup>25</sup> Rozaini Nasution, *Teknik Sampling*, Universitas Sumatera Utara, 2003, h.5

- 2) Minimal pinjaman Rp.10.000.000
- 3) Nasabah aktif
- 4) Sudah menjalankan usaha minimal 2 tahun.

b. Bersedia diwawancara

c. Nasabah berjumlah 4 kelompok.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian di desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan.

## D. Teknik Pengelola Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi merupakan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap yang diteliti. Melalui teknik ini peneliti melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan subjek penelitian maupun data yang ingin di kumpulkan.<sup>26</sup> hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sutrisno Hadi,

---

<sup>26</sup> Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004, h.39

yang dimaksud dengan teknik observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>27</sup>

Pada teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti.

Yang menjadi pengamatan langsung adalah Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Pembuang Hulutersebut.

Dengan ini di gunakan untuk mengumpulkan data tentang :

- a. Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam memberikan piutang atau pinjaman bagi para usaha mikro.
- b. Perkembangan para usaha mikro tersebut setelah melakukan pinjaman pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara ini dapat di pakai untuk melengkapai data yang diperoleh melalui observasi.

Dalam hal ini untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian danapa pandangan masyarakat tentang kehadiran Unit Pengelola Kegiatan di Desa Pembuang Hulu. Dengan meminta keterangan kepada subjek peelitian, kemudian para subjek tersebut dapat memberikan keterangan dan jawaban

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1989, h.

dengan jelas dan baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, dengan menetapkan pertanyaan secara terbuka dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan.

Data yang dikumpulkan dengan tehnik penelitian ini adalah:

- a. Program seperti apa saja yang dilakukan UPK dalam meningkatkan perekonomian di desa Pembuang Hulu?
- b. Bentuk-bentuk kendala yang dihadapi UPK dalam meningkatkan perekonomian di desa Pembunag Hulu?
- c. Dampak sebelum dan sesudah adanya UPK bagi usaha mikro yang ada di desa Pembuang Hulu?
- d. Kelebihan dan kekurangan UPK bagi masyarakat di desa pembuang hulu di bandingkan dengan lembaga keuangan bank?

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap persyaratan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiwa.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data beberapa catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan data yang digali. Adapun data yang didapat dari mengkaji dokumentasi gambaran umum lokasi penelitian (profil)

UMKM yang mengajukan Kredit di Desa Pembuang Hulu. Data yang dikumpulkan dengan teknik ini sebagai berikut:

- a. Berupa foto-foto dari anggota yang memiliki usaha mikro produktif.
- b. Berupa formulir, syarat, dan prosedur pengajuan kredit simpan pinjam di UPK.

#### **E. Pengabsahan Data**

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan menggunakan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data. Dengan mengacu pada Denzin, menurutnya pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini ada 4 macam triangulasi yaitu, triangulasi peneliti, triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.<sup>28</sup>

Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>29</sup> Keabsahan data dalam penelitian ini menjamin bahwa dalam mendeskripsikan sejauh mana Peran

---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2007, h.264.

<sup>29</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal, Vol. 10 No.4, 2010, h.56.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Pembuang Hulu.

## F. Analisis Data

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yakni :

- a. Data *collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilihan.
- b. Data *reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
- c. Data *display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
- d. *conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h.69-70

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Desa Pembuang Hulu**

Pembuang Hulu, merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Desa Pembuang Hulu terbagi menjadi dua desa Pembuang Hulu 1 dengan luas wilayah kurang lebih 64 km dan desa Pembuang Hulu 2 dengan luas wilayah 98 km. Dengan kepadatan jumlah penduduk 22.141 jiwa suku mayoritas dayak, dan beragama islam. Penduduk desa Pembuang Hulu memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat tergantung pada sumber daya alam terutama untuk usaha perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Oleh karena itu kesejahteraan penduduk kecamatan hanau khususnya desa Pembuang Hulu sangat tergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten. Kecamatan hanau adalah kecamatan yang berada di tengah-tengah bantaran sungai seruyan yang mengalir dan membelah kabupaten seruyan dari muara laut jawa sampai ke p huluan sungai seruyan, serta kecamatan hanau yang berada di lintasan jalan raya antara dua kabupaten yaitu kabupaten kotawaringin barat dan kota waringin timur.

Kecamatan Hanau merupakan salah satu kecamatan tertua di kabupaten Seruyan setelah Danau Sembuluh. Kecamatan Hanau terbentuk pada masa pemerintahan Belanda dan pejabatnya disebut Assisten Kiai dan bertanggung jawab kepada pemerintahan di Sampit. Pada saat itu di Seruyan terdapat desa-

desa penghubung antara Kiai (Camat), diantaranya adalah Kampung Pembuang Hulu dan Kampung Tanjung Hanau. Secara pemerintahan, sebelum tahun 1880, masih bernama kampung (Shoofd) Pembuang Hulu. Kemudian pada tahun 1880 maka ditempatkan “Onderdistrictshoofd” (sekarang Kecamatan) di Telaga Pulang sebagai Ibukotanya. Pada tahun 1902, pemerintahan “Onderdistrictshoofd” kembali dipindahkan ke Pembuang Hulu, dan pada tahun 1905, pemerintahan “Onderdistrictshoofd” kembali dipindahkan ke Kuala Pembuang. Mengingat akses pemerintahan dari desa-desa penghubung antara Kiai (Camat) terlalu jauh ke Kuala Pembuang maka pada tahun 1963 dibentuklah sebuah kecamatan (pemekaran dari Seruyan Hilir) dengan nama Kecamatan Hanau yang beribukota di Desa Pembuang hulu.

Secara geografis wilayah daratan Kecamatan Hanau berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Danau Seluluk, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Danau Sembuluh, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Raya dan Danau Sembuluh, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat. Terletak antara  $111^{\circ}80'$ – $112^{\circ}17'$  Bujur Timur dan  $02^{\circ}24'$ – $02^{\circ}41'$  Lintang Selatan, dan berada pada ketinggian rata-rata 25-50m (dpl) dengan suhu rata-rata  $23^{\circ}$ – $30^{\circ}\text{C}$ .

**Visi** : “ Mewujudkan Kecamatan Hanau sejajar dengan kecamatan lainnya yang telah maju, sehingga terpendang dan terhormat di tingkat kabupaten maupun propinsi serta Nasional”.



**Misi :**

1. Pembangunan menyebar dan proposional.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Peningkatan partisipasi masyarakat
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sector
5. Pengolahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan prinsip kelestarian, manfaat dan ekonomi.
6. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang mampu menyentuh langsung serta menumbuhkan kemandirian bagi lapisan masyarakat.
7. Terciptanya keharmonisan dalam perencanaan pembangunan daerah lintas wilayah, lintas sektor dan antar instansi melalui koordinasi dan kerjasama yang intensif.
8. Tersusunnya perencanaan pembangunan yang memprioritaskan efisiensi dan efektifitas dalam memanfaatkan sumberdaya daerah berazaskan keterbukaan.
9. Mengedepankan profesionalisme dan kreatifitas kerja.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Di akses dari [www.bakungpermai.com/2016/05/kecamatan-hanau.html?m=1](http://www.bakungpermai.com/2016/05/kecamatan-hanau.html?m=1) pada tgl 28 juli 2019 pukul 10.52 Wib.

## 2. PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah perdesaan.<sup>32</sup>

### a. Keluaran Program

Program yang di terapkan PNMP Mandiri perdesaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terjadinya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin (RTM) dan kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat adat mulai tahap perencanaan pelaksanaan/pengawasan sampai dengan pelestarian;
- 2) Adanya keterpaduan sistem pembangunan partisipatif model PNPM Mandiri perdesaan dan program sejenis kedalam sistem pembangunan reguler;
- 3) Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa;
- 4) Terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintah lokal khususnya pemerintah desa dalam fasilitasi pembangunan partisipatif berwawasan lingkungan;
- 5) Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri perdesaan bagi masyarakat;

---

<sup>32</sup>Wikipedia, diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Perdesaan#Gambaran\\_Umum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Perdesaan#Gambaran_Umum). Pada tanggal 29 maret 2019 pukul 10:40 WIB

- 6) Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM;
- 7) Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan;
- 8) Terjadinya peningkatan peran serta kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

#### **b. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan**

Pedoman umum, PNPM Mandiri perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan di ambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan umum mandiri perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata;
- 2) Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar;
- 3) Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan

penyelarasan pembangunan sektoral dan antar desa yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat;

- 4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin;
- 5) Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil;
- 6) Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik;
- 7) Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat;
- 8) Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparan dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;

- 9) Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan;
- 10) Keterpaduan, keselarasan dan kesetupaduan kebijakan. Pengertian prinsip ini menekankan bahwa arah kebijakan dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan program lebih menekankan sistem penyalarsan perencanaan politik, teknoratis dengan tetap mengacu pada perencanaan partisipatif yang diintegrasikan kedalam sistem reguler;
- 11) Keberlanjutan. Pengertian prinsip ini adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

**c. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan**

1) Lokasi sasaran

Lokasi sasaran PNPM Mandiri perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori bermasalah dalam PKK/PNPM Mandiri Perdesaan.

2) Kelompok sasaran

- a) Masyarakat miskin dan masyarakat adat di perdesaan,
- b) Kelembagaan masyarakat adat di perdesaan,

c) Kelembagaan pemerintah lokal.<sup>33</sup>

### **3. Sejarah Singkat Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di segala bidang, segenap kemampuan dan potensi harus dimanfaatkan dengan baik dan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oleh sebab itu untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, salah satunya adalah dengan memperkuat permodalan melalui kebijaksanaan perkreditan yang mudah dan memadai, sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Setiap manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari keinginan untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Kebutuhan tersebut akan terus meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan kemampuan untuk memenuhinya sangat terbatas. Adanya perasaan kekurangan secara finansial membuat orang berpikir untuk berusaha mendapatkan bantuan dana dari pihak lain yang berasal dari berbagai sumber, baik melalui lembaga bank maupun non bank dan lain sebagainya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan di Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan adalah salah satu program lembaga keuangan bukan bank (non bank) hadir dengan misi utama pengetasan

---

<sup>33</sup> Tim Koordinasi PNPM-PPK, *Petunjuk Teknis Operasional*, Jakarta: 2007. H.6-8

kemiskinan memberikan pelayanan penyaluran kredit usaha kecil menengah UMKM. Program PNPM berdiri dan diterapkan pada 30 April tahun 2007 kemudian berakhir dan dihentikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 karena kurang efektif dengan berbagai alasan dan isu. Tetapi program tersebut berjalan kembali pada tahun 2015 dalam tahap menjadi Badan Usaha Milik Desa di kelola secara mandiri oleh perangkat desa, salah satunya adalah Unit Pengelola kegiatan (UPK) merupakan keberlanjutan dari program PNPM Mandiri perdesaan yang di hentikan oleh pemerintah. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Pмбуang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan berdiri dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki berpenghasilan rendah, baik untuk keperluan konsumtif dan kebutuhan produktif UMKM menjadi prioritas Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan adalah salah satu program pemerintah, bukan lembaga bank (non bank) yang menjadi alternatif masyarakat di Desa Pмбуang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat. Adapun misi utama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit.

### a. Struktur Organisasi

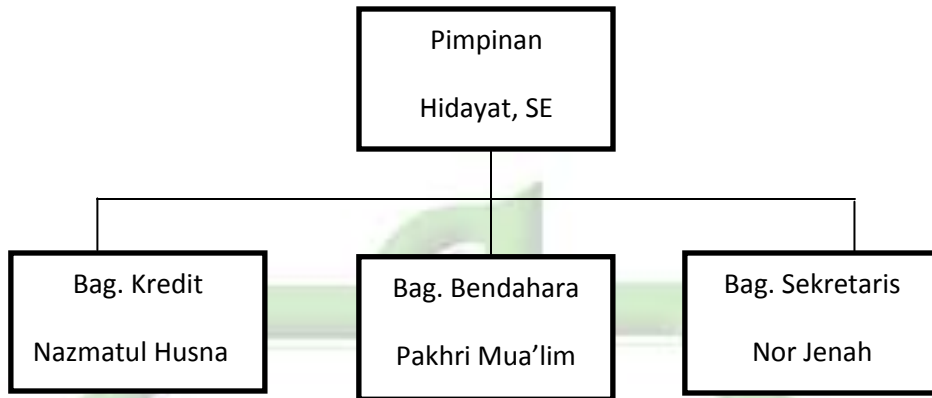
Segala kegiatan yang menyangkut bidang usaha apapun tentu memerlukan suatu organisasi, karena dalam suatu organisasi terdapat wewenang dan tanggung jawab yang berfungsi untuk memberdayakan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Besar kecilnya organisasi berjalan sejajar dengan besar kecilnya perusahaan yang bersangkutan. Hal ini berarti dengan semakin besarnya suatu perusahaan, maka semakin besar pula organisasinya dan sebaliknya semakin kecil perusahaan maka semakin kecil pula organisasinya. Adapun mengenai bentuk struktur organisasi yang dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Pembuang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan adalah merupakan *Struktur Organisasi Garis*, yaitu suatu bentuk organisasi dimana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan dan kebijaksanaan serta tanggung jawab ada pada satu tangan.

Lebih jelasnya mengenai struktur organisasi yang dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Pembuang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Struktur Organisasi



*Sumber : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Pembunag Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan*

**b. Prosedur Pinjaman Dana Simpan Pinjam yaitu:**

1. Pemohon Pinjaman

Setiap kalinya para anggota perorangan atau kelompok yang ingin mendapatkan pinjaman dari simpan pinjam unit pengelola kegiatan (UPK) harus mengusulkan permohonan terlebih dahulu kepada pengurus simpan pinjam Unit Pengelola Kegiatan yang ada di Desa Pembuang Hulu. Yang selanjutnya di analisa oleh pihak pengelola apakah layak atau tidak untuk disalurkan pinjaman tersebut, hal ini merupakan prosedur yang harus di ikuti bagi setiap calon anggota yang ingin mendapatkan pinjaman tersebut.

1) Administrasi

Jika proses pengajuan permohonan sudah selesai atau sudah mendapat tanggapan dari pihak pengelola, maka selanjutnya para calon anggota melengkapi administrasi, seperti melengkapi identitas secara lengkap, seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

## 2) Jaminan

Untuk mengatasi resiko kerugian, dari pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) biasanya harus ada jaminan bisa berupa surat berharga dan lain sebagainya dari para calon anggota dan usaha apa yang di jalankan. Biasanya pihak pengelola melakukan survey kelapangan terlebih dahulu.

## 3) Jangka Waktu Pencairan

Dari proses pengajuan proposal pinjaman dana simpan pinjam, hingga disetujui proposal tersebut, untuk jangka waktu pencairan dana tersebut bisa memakan waktu hingga satu atau dua bulanan.

### **c. Jenis-jenis Usaha Yang Dibiaya Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

Berdasarkan hasil wawancara, berikut ini merupakan beberapa usaha yang dibiayai kredit Simpan Pinjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) khususnya di Desa Pembuang Hulu, yaitu :

- 1) Usaha Tukang Jahit
- 2) Usaha Budi Daya Ikan Nila
- 3) Usaha Petani (Pembeli) Buah sawit

4) Usaha Warung Sembako.<sup>34</sup>

Pada tabel 4.2 dapat di ketahui mengenai perkembangan jumlah anggota dan kredit pinjaman dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 4.2  
Perkembangan Jumlah Anggota dan Pinjaman Kredit  
Tahun 2012 s/d 2018

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pinjaman/Kredit
2012	377	312.925.000,00
2013	392	323.625.000,00
2014	412	411.730.000,00
2015	429	508.950.000,00
2016	455	510.470.000,00
2017	472	555.995.000,00
2018	482	596.620.000,00

*Sumber: Unit Pengelola kegiatan (UPK) di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, 2019.*

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut di atas dapat di ketahui bahwa jumlah anggota dan jumlah pinjaman/kredit Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Pembunag Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan informasi, mengenai perkembangan ke

---

<sup>34</sup> Hidayat, *Tim Pelaksanaan Kegiatan UPK*

untungan yang di dapatkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada tahun 2018 tahun lalu sebesar Rp.335.000.000,00 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## **B. Pemaparan Data**

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Badan Penelitian dan Pengembangan kabupaten Seruyan (BPP), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya disampaikan peneliti terjun ke lapangan melakukan penggalan data. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti menemui pimpinan unit pengelola kegiatan (upk) bapak Hidayat di desa Pembuang Hulu dan memulai wawancara.

### **1. Peran keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa Pembuang Hulu**

Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan observasi dengan Bapak H, selaku pimpinan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dapat diketahui bahwa unit pengelola kegiatan tersebut merupakan program keberlanjutan dari PNPM Mandiri Perdesaan yang sampai sekarang masih beroperasi dengan dana atau modal dari peninggalan X PNPM 2014 walaupun masih banyak kendala atau kredit macet dari anggota perguliran dana dari tahun ketahun masih meningkat dan dapat menutupi dari kendala tersebut. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mendapat perhatian masyarakat Pembuang

Hulu yang sangat besar sesuai fungsinya yaitu melayani simpan pinjam kredit dengan prosedur dan syarat yang telah ditetapkan pihak pengelola upk bahkan banyak masyarakat yang menjadi anggota dan mengajukan pinjaman. Sasaran utama dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek bapak H, selaku pimpinan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang beralamat di Jl. Bakrie Entong No.150 desa Pembuang Hulu pada pukul 11.00 WIB Senin, 08 juli 2019. Pada saat itu peneliti pertama kali berhadapan langsung dengan bapak H selaku pimpinan unit pengelola kegiatan (upk). Peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan skripsi yang peneliti buat. Agar lebih jelas berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang di dapat peneliti.

### **Subjek 1**

Nama : H

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua Pimpinan UPK

Peneliti menanyakan program apa saja yang di lakukan UPK dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Pembuang Hulu ? Berikut penuturan bapak H:

“Untuk peningkatan perekonomian yang salah satunya yaitu program simpan pinjam dalam arti langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan ada juga program pendanaan, pengadaan sarpras”<sup>35</sup>

Maksud dari penuturan dari bapak H, yaitu adalah bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pembuang Hulu program yang mereka luncurkan atau jalankan yaitu program simpan pinjam kredit dalam arti program tersebut diharapkan menyentuh golongan masyarakat perekonomian yang kurang mampu, sehingga dapat memberikan kesempatan dan suatu peluang untuk menjalankan suatu usaha maupun tambahan modal usaha yang masyarakat tekuni terkhususnya masyarakat desa pembuang hulu yang masih banyak memerlukan bantuan dalam perekonomian dan ada juga program pendanaan, pengadaan sarpras.

Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang usaha apa saja yang paling banyak mengajukan pinjaman di UPK? Berikut penuturan bapak H:

“Usaha yang paling banyak mengajukan pinjaman yaitu mayoritas usaha dagang, ada juga peternak, budidaya ikan, peternak ayam, dan perkebunan seperti meminjam untuk modal menanam sawit dan ada juga meminjam untuk pengumpul (pembeli) buah sawit dari masyarakat”<sup>36</sup>

Maksud dari penuturan dari bapak H, yaitu adalah usaha yang paling banyak mengajukan pinjaman mayoritas atau paling banyak adalah usaha dagang, ada juga usaha budidaya ikan, peternak ayam, dan petani kelapa sawit.

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan responden H ditempat kantor unit pengelola kegiatan Jl.Bakrie Entong No.150, senin08 juli 2019 pada pukul 11.00 wib.

<sup>36</sup>Wawancara dengan responden H ditempat kantor unit pengelola kegiatan Jl.Bakrie Entong No.150, senin08 juli 2019 pada pukul 11.00 wib.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali, apakah keberadaan upk membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman ? Berikut penuturan bapak H:

“Keberadaan upk kami melihat atau menilai sangat membantu masyarakat sekali karena kami melihat partisipasi masyarakat sangat antusias sekali malahan dari pihak kami kekurangan dana untuk peminjaman ke nasabah karena dana yang kami luncurkan sangat terbatas. Penyebabnya tidak ada suntikan dari pihak ketiga, kami hanya mengelola peninggalan dana X PNPM 2014. Sampai sekarang dana itu bisa berjalan dan bisa membantu masyarakat khususnya masyarakat desa Pembuang Hulu kurang mampu ataupun miskin”<sup>37</sup>

Maksud dari penuturan bapak H, yaitu adanya program upk di desa pembuang hulu dapat membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman atau suntikan modal selain melalui lembaga bank, banyak sekali masyarakat yang andil atau antusias, pada program ini menurut penilai bapak H, selaku pimpinan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Malahan dari pihak upk kekurangan dana untuk di pinjamkan kepada masyarakat desa pembuang hulu yang menjadi anggota dari program ini. Pihak UPK hanya memanfaatkan dana sisa peninggalan X PNPM pada tahun 2014. Tidak ada suntikan dana dari pihak ketiga, sampai sekarang dana itu masih berjalan dan dapat membantu masyarakat desa pembuang hulu yang tidak mampu.

Untuk meyakinkan hasil wawancara peneliti menggunakan tehnik triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan responden H ditempat kantor unit pengelola kegiatan Jl.Bakrie Entong No.150, senin08 juli 2019 pada pukul 11.00 wib.

berbeda. Berikut peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 yang peneliti wawancarai:

**Informan 1**

Nama : J

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Desa Pмбуang Hulu 1

Peneliti menanyakan apakah benar program yang dilakukan UPK dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Pмбуang Hulu ? Berikut penuturan bapak J:

“Yang saya ketahui program upk dapat membantu masyarakat, yang memerlukan pinjaman modal, untuk usaha. Baik pinjaman berkelompok maupun perorangan, masyarakat pмбуang hulu menjadi terbantu dalam peningkatan perekonomian, sejak adanya program upk”<sup>38</sup>.

**2. Dampak keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian Desa Pмбуang Hulu**

Untuk mengetahui dampak keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa Pмбуang Hulu, peneliti melakukan observasi awal dengan ibu N, selaku menjabat bagian kredit yaitu bagian yang mengurus data-data anggota yang mengajukan pinjaman. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu, dan mendapatkan beberapa daftar nama-nama responden yang sesuai kriteria peneliti inginkan.

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan bapak j ditempat rumah kediaman Jl.kalimantan,sabtu 27 juli 2019 pada pukul 14.00 wib



Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan subjek ke dua ibu H, usaha penjahit untuk mengetahui bagaimana dampak unit pengelola kegiatan (upk), terhadap perekonomian masyarakat desa Pembuang Hulu, khususnya responden. Yang beralamat di jl. Junjung buih Pembuang Hulu 2. Pada pukul 14.00 WIB Sabtu, 13 juli 2019.

## **Subjek 2**

Nama : HN

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pengusaha jahit dan sembako

Peneliti menanyakan nama sesuai ktp ? jumlah pinjaman ? dan untuk usaha apa ? Berikut penuturan ibu HN

“Nama saya HN pembuang hulu 2, jumlah pinjaman saya berjumlah Rp.2.000.000, untuk tambahan modal usaha jahit”<sup>39</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimana perkembangan usaha anda setelah melakukan pinjaman di upk ? berikut penuturan ibu HN

“Saya sangat terbantulah dengan adanya suntikan dana dari upk usaha semakin lancar gitu aja”

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali bagaimana menurut anda tentang keberadaan (peran) UPK dan kenapa anda lebih memilih mengajukan pinjaman di upk di bandingkan di lembaga bank ? berikut penuturan ibu HN

“Adanya upk dapat memudahkan masyarakat contohnya seperti saya yang memerlukan modal untuk usaha. Alasan mengapa saya lebih memilih mengajukan pinjaman di upk di bandingkan dengan bank,

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan responden HN ditempat rumah kediaman Jl.Junjung Buih No.150,sabtu 23 juli 2019 pada pukul 14.00 wib.

kitakan Cuma orang biasa ngga punya, ijin usaha, Cuma punya ktp jadi enaknya upk Cuma pakai ktp tahun dulu, kalo sekarang sudah pakai jaminan, saya mengajukan pinjaman lagi untuk usaha sembako”<sup>40</sup>  
Maksud dari informan ke dua ibu HN, adalah nama sesuai ktp nya HN, dengan jumlah pinjaman Rp.2.000.000, untuk tambahan modal usaha jahit yang ibu HN, tekuni. Ibu HN, menjelaskan setelah melakukan pinjaman usaha nya sangat terbantu, semakin lancar. Alasan ibu HN, lebih memilih mengajukan pinjaman di upk di bandingkan dengan lembaga bank, ibu H, menjelaskan dia hanya orang biasa, tidak memiliki ijin usaha, hanya memiliki ktp dan ibu H, mengajukan pinjaman lagi untuk usaha sembako (pedagang).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali dengan informan ke tiga. Yaitu ibu S, usaha dagang, jl. Abdul rasyid Pembuang Hulu. Pada pukul 14.40 WIB. Rabu, 17 juli 2019.

### **Subjek 3**

Nama : S  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Pengusaha dagang

Peneliti menanyakan nama sesuai ktp ? jumlah pinjaman ? dan untuk usaha apa ? Berikut penuturan dari ibu S

“Nama saya S, jumlah pinjaman saya Rp. 20.000.000 jika waktu angsuran 24 bulan. Untuk usaha jualan minyak, warung makan”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan responden HN ditempat rumah kediaman Jl.Junjung Buih No.150,sabtu 23 juli 2019 pada pukul 14.00 wib.

<sup>41</sup>Wawancara dengan responden S ditempat rumah kediaman Jl.Abdul Rasyid, Rabu 17 juli 2019 pada pukul 14.40 wib.

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimana perkembangan usaha anda setelah melakukan pinjaman di UPK ? berikut penuturan ibu S

“Usaha saya setelah melakukan pinjaman aga mudah di permudah dikit”<sup>42</sup>

Peneliti menanyakan kembali bagaimana menurut anda tentang keberadaan upk (peran) dan kenapa anda lebih memilih mengajukan pinjaman di UPK di bandingkan di lembaga bank ? berikut penuturan ibu S

“Keberadaan upk menurut saya aga terbatulah kita yang kurang modal. Alasan saya lebih memilih mengajukan pinjaman di upk alasannya tidak banyak proses asalkan sudah ada jaminan sudah bisa pinjam atau mengajukan pinjaman”<sup>43</sup>

Maksud dari penuturan dari ibu S adalah nama sesuai ktp S, dengan jumlah pinjaman Rp.20.000.000; untuk usaha warung makan dan berjualan minyak BBM dalam tempo pinjaman 24 bulan. Setelah melakukan pinjaman usaha ibu S menjadi lebih mudah dalam arti makanan dan BBM yang iya jual lebih banyak dari sebelumnya. Keberadaan upk menurut ibu S, terbantu usahanya yang kekurangan modal. Ibu S lebih memilih mengajukan pinjaman di upk alasannya karena tidak banyak proses asalakan ada jaminan sudah bisa mengajukan pinjaman tidak memerlukan surat ijin usaha.

Kemudian peneliti menemui informan ke empat untuk melakukan wawancara kembali dengan ibu E, ,jl. Yala persada angkasa. Pada pukul 16.00

WIB Senin, 15 juli 2019

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan responden S ditempat rumah kediaman Jl.Abdul Rasyid, rabu 17 juli 2019 pada pukul 14.40 wib.

<sup>43</sup>Wawancara dengan responden S ditempat rumah kediaman Jl.Abdul Rasyid, rabu 17 juli 2019 pada pukul 14.40 wib.

#### Subjek 4

Nama : E

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pengusaha budidaya ikan nila

Peneliti menanyakan nama sesuai ktp ? jumlah pinjaman ? dan untuk usaha apa ? Berikut penuturan dari ibu EM

“Nama saya EM, kemaren saya pinjam kurang lebih Rp. 15.000.000 dalam jangka waktu tempo 24 bulan. Untuk usaha budidaya ikan nila”<sup>44</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimana perkembangan usaha anda setelah melakukan pinjaman di UPK ? berikut penuturan ibu E

“Dengan adanya program upk tentu sangat-sangat membantu sekali karena dengan adanya pinjaman itu cukup terbantu sekali karena perekonomi kita sekarangkan susah dengan adanya pinjaman itu saya bisa menambah pemeliharaan, makanannya juga, trus saya juga bisa membuat tambak yang baru, kolam yang baru, dengan adanya pinjaman itu dan harapan saya dengan pinjaman ini usaha saya tambah lancar lagi”<sup>45</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali bagaimana menurut anda tentang keberadaan UPK (peran) dan kenapa anda lebih memilih mengajukan pinjaman di upk di bandingkan di lembaga bank ? berikut penuturan ibu E

“Adanya program upk ini saya tau nya dari dulu jadi sangat membantu masyarakat-masyarakat sepeerti saya ini kan tergolong orang yang tidak mampu, jadi dengan adanya upk ini sangat membantu sekali dan

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan responden EM ditempat rumah kediaman Jl.Yala Persada Angkasa,Senin 15 juli 2019 pada pukul 16.00 wib.

<sup>45</sup>Wawancara dengan responden EM ditempat rumah kediaman Jl.Yala Persada Angkasa,Senin 15 juli 2019 pada pukul 16.00 wib.

memudahkan masyarakat juga untuk masalah ekonominya. Masalah saya lebih memilih pinjaman di upk saya ini pada waktu pinjaman juga tanya-tanya bagaimana proses meminjamannya, seperti apa, dan ternyata kalo di upk ini mudah sekali dan persyaratannya juga tidak mempersulit kita gitu tanggapan saya memilih pinjaman di upk dan juga jika terlambat pembayaran angsuran denda nya juga tidak terlalu besar meringkan sekali bagi saya.”<sup>46</sup>

Maksud dari ibu E, adalah nama sesuai ktpEM, dengan jumlah pinjaman Rp.15.000.000 dalam tempo kurang lebih 24 bulan, untuk usaha budidaya ikan nila. Keberadaan upk ibu sudah mengetahui waktu dulu dalam arti sebelum menjadi anggota ibu E sudah mengetahui seluk beluk upk. Adanya upk sangat membantu pada perkonomian sekarang yang makin susah adanya pinjaman upk dapat membantu pemeliharaan, makanan, membuat tambak, dan kolam baru. Adanya upk dapat membantu masyarakat miskin atau tidak mampu. Alasan ibu E, lebih memilih mengajukan pinjaman di upk di bandingkan d lembaga ke uangan bank, karena persyaratannya lebih mudah dan denda jika lewat tempo pembayaran tidak terlalu besar.

Kemudian peneliti menemui informan ke lima untuk melakukan wawancara kembali dengan ibu M, , jl. Yala persada angkasa. Pada pukul 13.00 WIB kamis, 15 Agustus 2019

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan responden EM ditempat rumah kediaman Jl.Yala Persada Angkasa,Senin 15 juli 2019 pada pukul 16.00 wib.

## Subjek 5

Nama : MR

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pegumpul (pembeli) Buah Sawit

Peneliti menanyakan nama sesuai ktp ? jumlah pinjaman ? dan untuk usaha apa ? Berikut penuturan dari ibu MR

“Nama saya MR, kemaren saya pinjam Rp.20.000.000 dalam jangka waktu 14 bulan. Untuk usaha pengumpul buah sawit”<sup>47</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimana perkembangan usaha anda setelah melakukan pinjaman di UPK ? berikut penuturan ibu MR

“Dengan adanya pinjaman dari upk, usaha saya terbantu untuk tambahan modal, membeli buah sawit dari petani sekitar desa pembuang hulu”<sup>48</sup>

Peneliti menanyakan kembali bagaimana menurut anda tentang keberadaan UPK (peran) dan kenapa anda lebih memilih mengajukan pinjaman di upk di bandingkan di lembaga bank ? berikut penuturan ibu MR

“Adanya upk, dapat membantu saya dalam menjalankan usaha, membantu sekali dalam perputaran modal dalam membeli buah sawit dari masyarakat, alasan mengapa saya mengajukan pinjaman di upk karena saya, sudah meminjam juga di bank, di upk menurut saya lebih mudah, tidak banyak proses”<sup>49</sup>

Maksud dari ibu MR, mengajukan pinjaman RP.20.000.000, dalam waktu tempo 14 bulan, untuk usaha pengumpul buah sawit dari petani sekitar desa pembuang hulu. Adanya upk dapat membantu dalam tambahan modal usaha,

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan responden MR ditempat rumah kediaman Jl.Yala Persada Angkasa,kamis 15 Agustus 2019 pada pukul 13.00 wib.

<sup>48</sup>Wawancara dengan responden MR ditempat rumah kediaman Jl.Yala Persada Angkasa,kamis 15 Agustus 2019 pada pukul 13.00 wib.

<sup>49</sup>Wawancara dengan responden MR ditempat rumah kediaman Jl.Yala Persada Angkasa,kamis 15 Agustus 2019 pada pukul 13.00 wib.

sangat terbantu dalam perputaran modal. Alasan mengapa lebih memilih mengajukan pinjaman di upk karena, ibu MR sudah ada pinjaman di lembaga bank, mengajukan pinjaman di bank menurut ibu MR, lebih mudah dan tidak terlalu banyak proses.

Kesimpulan pernyataan bahwa dari subjek ke-2, 3, 4 dan subjek 5, peran dan dampak UPK sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat desa pembuang hulu, khususnya dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Baik dalam pinjaman permodalan ataupun membuka sebuah usaha baru. Program UPK menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengajukan pinjaman selain di lembaga bank dan lembaga keuangan lainnya. Menurut mereka pinjaman di UPK lebih mudah dan tidak memerlukan ijin usaha. Beberapa jenis usaha yang mengajukan pinjaman di antaranya usaha jahit, warung sembako, budidaya ikan, dll.

b. Informan meliputi kerabat dan tetangga anggota yang melakukan pinjaman di UPK desa Pembuang Hulu.

**1) Informan 2**

Nama : I  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kerabat : Subjek 2 Ibu HN

Peneliti menanyakan apakah benar ibu HN anggota UPK dan bagaimana usahanya setelah melakukan pinjaman ? Berikut penuturan bapak i:

“Benar, ibu HN anggota upk sudah sejak lama dan sudah mengajukan pinjaman dua kali. Saya ,melihat usaha jahit nya terbantu, bisa untuk membeli kain bahan baku dan juga alat-alat lainnya”<sup>50</sup>

## 2) Informan 3

Nama : MK  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kerabat : Subjek 3 Ibu S

Peneliti menanyakan apakah benar ibu S anggota UPK dan bagaimana usahanya setelah melakukan pinjaman ? Berikut penuturan bapak MK:

“Benar, ibu S anggota upk mengajukan pinjaman untuk usaha jualan warung sembako dan minyak. Saya ,melihat usahanya sangat terbantu, untuk tambahan modalnya”<sup>51</sup>

## 3) Informan 4

Nama : HL  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kerabat : Subjek 4 Ibu EM

Peneliti menanyakan apakah benar ibu EM anggota UPK dan bagaimana usahanya setelah melakukan pinjaman ? Berikut penuturan bapak

HL:

“Benar, ibu EM anggota upk, saya menilai usaha budidaya ikan nilanya terbantu, baik dalam pemeliharaan, pangan, dan bibit”<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan bapak i ditempat rumah kediaman Jl.Putri junjung buih,minggu 28 juli 2019 pada pukul 14.00 wib

<sup>51</sup>Wawancara dengan bapak MK ditempat rumah kediaman Jl.Jendral Sudirman,minggu 28 juli 2019 pada pukul 14.30 wib

<sup>52</sup>Wawancara dengan bapak HL ditempat rumah kediaman Jl.Jendral Sudirman,minggu 28 juli 2019 pada pukul 16.00 wib



#### 4) Informan 5

Nama : RH  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kerabat : Subjek 5 Ibu MR

Peneliti menanyakan apakah benar ibu MR anggota UPK dan bagaimana usahanya setelah melakukan pinjaman ? Berikut penuturan bapak RH:

“Benar, ibu MR anggota upk, saya menilai usahanya terbantu dengan adanya tambahan modal, sehingga memudahkan ibu MR dalam perputaran modal jual beli buah sawit usahanya”<sup>53</sup>

### 3. Kendala dan Solusi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian Desa Pembuang Hulu

Untuk mengetahuikendala dan solusi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Meningkatkan perekonomian di desa Pembuang Hulu peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 (satu) yaitu bapak H, selaku pimpinan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Peneliti bertanya apakah ada kendala dalam pengembalian atau kredit dari nasabah, misal kredit macet ? berikut penuturan bapak H

“Kalo kendala pasti ada, mungkin salah satunya yaitu tunggakan ataupun bahasanya dana yang di targetkan harus kembali setiap bulan ternyata pasti ada melebihi dari target”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan bapak RH ditempat rumah kediaman Jl.Putri junjung buih,Senin 29 juli 2019 pada pukul 14.00 wib

<sup>54</sup>Wawancara dengan responden H ditempat kantor unit pengelola kegiatan Jl.Bakrie Entong No.150, senin08 juli 2019 pada pukul 11.00 wib.

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana solusi upk dalam menghadapi nasabah yang mengalami kredit macet atau lewat jatuh tempo pinjaman ? berikut penuturan bapak H

“Untuk solusi mungkin kami ada beberapa tahap untuk penyelesaian masalah tunggakan yaitu yang pertama, kami melakukan ketika nasabah tersebut menunggak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut kami memberikan surat peringatan pertama ( sp.1), setelah tidak ada tanggapan kami melakukan atau melanjutkan kembali yaitu surat peringatan kedua (sp.2), setelah berjalan 4 bulan tunggakan jika tidak di tanggapi juga oleh nasabah pihak kami akan surat peringatan 3 (sp.3), surat peringatan terakhir. Jika tidak ada juga tanggapan kami turun ke lapangan menemui nasabah menanyakan apa masalah dan kendalanya. Disitu kami akan melakukan musyawarah atau mufakat supaya tunggakan dapat di angsur kembali sampai lunas dan selanjutnya akan kami evaluasi kembali untuk terkait hal penanganan tersebut untuk saat ini alhamdulillah masih berjalan lancar tapi masih ada kendala-kendala yang perlu kami evaluasi kembali kedepannya dalam hal penanganan tunggakan”<sup>55</sup>

Maksud dari bapak H, adalah kendala pasti ada contohnya tunggakan dalam arti dana yang ditargetkan harus kembali setiap bulannya. Untuk solusi atau menyelesaikan masalah dari pihak upk mengeluarkan berupa surat peringatan atau SP 1, dalam 4 bulan pertama jika tidak ada respon maka akan di lanjutkan dengan surat peringatan ke dua atau SP 2, dalam jatuh tempo 5 bulan jika tidak ada respon juga maka akan di berikan surat peringatan terakhir atau SP 3. Jika tidak ada juga tanggapan maka pihak upk akan menemui langsung nasabah yang terkait untuk melakukan musyawarah atau menanyakan apa masalahnya, agar nasabah t dapat membayar kembali sisa pinjaman sampai dengan lunas. Kemudian akan di evaluasi kembali oleh pihak upk sampai sekarang cara

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan responden H ditempat kantor unit pengelola kegiatan Jl.Bakrie Entong No.150, senin08 juli 2019 pada pukul 11.00 wib.

tersebut masih efektif tidak sampai ke ranah hukum dan menjual atau lelang jaminan dari nasabah yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk mengetahui kendala dari anggota peneliti melakukan wawancara dengan informan 4 atau subjek ke-4 ibu E, yaitu sebagai berikut:

Peneliti menanyakan apakah ada kendala di rasakan selama meminjam ? berikut penuturan dari ibu E,

“sepengetahuan saya selama ini saya tidak pernah mengalami kendala apapun, mungkin yang menjadi kendala di awal itu proses pencairannya aga lama”<sup>56</sup>

Maksud dari ibu E, adalah dia tidak pernah merasakan kendala apapun, Cuma pada waktu awal peminjaman atau pencairan prosesnya lumayan lama.

Kesimpulan pernyataan dari subjek 1 dan subjek 4, yaitu adalah kendala yang alami UPK pada umumnya sama seperti program atau lembaga keuangan lainnya, yaitu seperti tunggakan atau keterlambatan pembayaran pada tempo waktu yang telah di sepakati, untuk menyelesaikannya pihak upk mengeluarkan surat peringatan, dan menemui anggota secara langsung dan kemudian melakukan kesepakatan kembali. Dari anggota atau subjek 4 kendala yang dirasakannya hanya berpendapat atau menilai proses pencairan dana masih terlalu lama.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan responden E ditempat rumah kediaman Jl.Yala Persada Angkasa,Senin 15 juli 2019 pada pukul 16.00 wib.

### **C. Analisis Penelitian**

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Pмбуang Hulu.

#### **1. Peran keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa Pмбуang Hulu**

Hasil wawancara dan obsevasi yang dilakukan peneliti, tahapan peran adalah mengetahui kedudukan dan keberhasilan program upk dalam meningkatkan perekonomian, upk merupakan sebuah program keberlanjutan dari PNPM Mandiri Perdesaan yang di kelola secara mandiri oleh perangkat desa, masyarakat miskin menjadi prioritas utama dari program upk dalam arti segala keputusan yang di ambil berpihak kepada masyarakat miskin dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Program upk berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan, memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan, lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, terbentuk dan berkembangnya kerjasama antara desa dalam pengelolaan pembangunan, peningkatan peran serta dan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangunan ekonomi dan menjadi opsi mengajukan pinjaman selain di lembaga keuangan. Sejak program upk berjalan di kecamatan hanau atau desa Pмбуang Hulu, banyak masyarakat lebih memilih mengajukan pinjaman di upk.

Biddle dan thomas menyepadankan peristiwa perandengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap *scritf*(semacam skenario), intruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat, dan reaksi umum penonton, serta di pengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku sosialpun mengalami hal yang hampir sama. Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial di masyarakat. Dalam hal ini seseorang individu juga harus patuh pada skenario, yang berupa norma sosial, tuntunan sosial dan kaidah-kaidah.

Jenis-jenis peran, di bagi menjadi tiga jenis, adalah sebagai berikut :

- 1) Peran aktif, adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi.
- 2) Peran partisipatif, adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>57</sup>

#### **a) Unsur-Unsur Kredit**

---

<sup>57</sup>Irham Fahni, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2014. h. 2-3

Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sulit untuk terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.
- 2) Waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis *Finace* khususnya oleh analis kredit. Ini dapat di mengerti karena bagi pihak kreditur saat ia menyerahkan uang kepada debitur maka juga harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri, yaitu limit waktu yang disepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- 3) Risiko (*degree of risk*), yang paling dikaji adalah pada keadaan yang paling terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak dapat kembali atau timbulnya kredit macet. Sehingga dengan begitu timbulah penempatan jaminan (*callateral*) dalam pemberian kredit.
- 4) Prestasi, yang dimaksud disini ialah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk di berikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang tetapi bisa juga dalam bentuk barang dan jasa.

- 5) Adanya kreditur adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada orang lain.
- 6) Debitur adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa yang berkomitmen untuk mampu mengembalikannya.

**b) Kredit menurut jangka waktu**

Kredit berdasarkan menurut jangka waktu adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit jangka pendek, kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya satu tahun, atau maksimal satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

TAP MPR II/MPR/1998 tentang garis-garis haluan negara pada Bab IV Pola umum pembangunan lima tahun kelima menyatakan bahwa: Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan untuk memproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengerahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Pembangunan masyarakat desa lebih dititik beratkan pada:

1. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia sebagai salah satu potensi di desa.
2. Penciptaan iklim yang mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan untuk mengali dan memanfaatkan sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
3. Peningkatan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi, mengolah dan memasarkannya, sehingga dapat memberikan peluang untuk memberikan kesempatan kerja.

Adapun langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut :

- 1) Memantapkan koordinasi dan keterpaduan semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan masyarakat desa, terutama dalam rangka meningkatkan keswadayaan keterampilan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perorangan maupun kelompok masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesempatan kerja di pedesaan.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan lembaga masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial, sehingga mampu secara swadaya menciptakan lapangan kerja dan berusaha.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kader-kader pembangunan desa, agar berperan sebagai motor penggerak pembangunan masyarakat desa.



- 5) Menciptakan iklim yang mendorong tumbuh dan berkembang prakarsa dan swakarsa masyarakat untuk mampu memproduksi dan memasarkan hasil produksi pedesaan.
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan penggunaan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta efisiensi pengolahan hasil produksi desa sehingga dapat meningkatkan produksi dan pemasarannya.
- 7) Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan masyarakat desa.

Dalam proses pelaksanaannya kelompok perempuan juga ikut dilibatkan, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam peranannya disetiap tahapan program upk dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.

Dalam segmentasi lokasi, upk terletak di pinggir jalan utama dan mudah di ketahui masyarakat. Pengajuan pinjaman dapat berkelompok dan individu. Kemudian syarat pengajuan tidak memerlukan surat ijin usaha, hanya memerlukan biodata seperti Ktp, Kartu keluarga, dan jaminan berupa surat-surat berharga seperti surat Skt dll.

Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART) BKAD “Harapan Itah” Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Asas, sifat, maksud, dan tujuan pasal 3, 4, dan 6. Berbunyi:

1. BKAD Harapan Itah memiliki sifat kolektif kolegial yang di landasi sifat gotong royong, suka rela dan tidak berfalsifikasi pada organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan tertentu.
2. BKAD Harapan Itah merupakan perkumpulan berbadan hukum yang melaksanakan kerjasama antar desa meliputi pengembangan kegiatan bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang bedaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan peberdayaan masyarakat antara desa, dan atau bidang ke amanan dan ketertiban.
3. Maksud dan tujuan BKAD Harapan Itah adalah untuk menjalin hubungan kerja yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang berwawasan pada kawasan perdesaan dan antar desa serta sebagai salah satu pilar pembangunan di masing-masing desa.
4. Kerjasama antar desa yang berlandaskan pada kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan secara terbuka dan gotong royong dalam semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu:
  - a. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, menuju kepada kesetaraan dan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan antar desa;

- b. Mewujudkan konektivitas yang terintegrasi dalam kawasan perdesaan dan antar desa;
  - c. Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan antar desa;
  - d. Mendayagunakan sumber daya lokal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
  - e. Menggali dan mengembangkan nilai moral religius dan nilai luhur kearifan budaya lokal;
  - f. Melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal dan dana bergulir PPK/PNPM Mandiri perdesaan.
5. Untuk mencapai maksud dan tujuan, BKAD Harapan Itah, melaksanakan kegiatan:
- a. Kegiatan pengembangan usaha bersama yang di miliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa;
  - c. Kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan lintas desa;
  - d. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha bersama di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan serta bidang usaha lain yang merupakan potensi ekonomi yang dimiliki desa, kawasan perdesaan, dan antar desa;

- e. Kegiatan pengembangan pendidikan masyarakat desa dan balai latihan usaha, sebagai sarana pendidikan moral ke agamaan, pengembangan diri, jiwa kewirausahaan dan pengetahuan teknologi informasi;
- f. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna, dan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Kegiatan pelestarian dan pengembangan aset masyarakat hasil kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

## **2. Dampak keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa Pмбуang Hulu**

Jika berbicara mengenai keberadaan suatu program atau lembaga keuangan maka tidak lepas dari dampak keberadaannya khususnya terhadap perekonomian masyarakat sejak program atau lembaga tersebut berdiri dan berjalan.

Peneliti menggunakan pendekatan *Field Research* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami sebuah masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Peneliti melihat, dan menilai keberadaan UPK dalam simpan pinjam berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat desa Pмбуang Hulu. Khususnya masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah atau miskin,

karena UPK lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat miskin, contohnya mengajukan pinjaman di UPK tidak terlalu dipersulit dengan syarat-syarat pengajuan pinjaman, lebih mudah, baik untuk tambahan permodalan ataupun suatu usaha baru. Program upk berdampak langsung terhadap pengusaha kecil UMKM dari hasil temuan peneliti pengusaha kecil atau UMKM yang ada di desa Pembuang Hulu, mereka menilai adanya program upk dapat membantu usaha mereka secara langsung, dapat mengajukan pinjaman untuk tambahan modal usaha, seperti contoh subjek 4 ibu EM, mengajukan pinjaman untuk usaha Budidaya Ikan Nila, menurut ibu EM, usahanya terbantu, bisa untuk menambah pemeliharaan, tambahan makanan, membuat tambak baru, kolam baru. Asalkan ada ktp, Kartu keluarga, dan jaminan sudah bisa mengajukan pinjaman, hanya saja proses pencairan dana yang di ajukan tidak langsung cair setelah di lakukan survey oleh pihak pengelola, harus menunggu, proses pencairan bergantian dengan anggota lain yan lebih dulu mengajukan pinjaman.

Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengerahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.

“Desa” dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa orientasi pelaksanaan pembangunan dititik beratkan diwilayah pedesaan. Desa pengertiannya adalah sebagai unit pemerintah terkecil, termasuk didalamnya pengertian kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1979. Makmur dalam pengertian ini dilihat dalam makna operasional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat desa lahir batin yang dicerminkan dengan terpenuhinya :

- 1) Kebutuhan pokok, baik jumlah maupun mutu terjamin.
- 2) Lapangan kerja terbuka luas, yang dimotori oleh kemampuan masyarakat sendiri untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
- 3) Aktivitas dan kemampuan ekonomi masyarakat, sudah semakin luas dan meningkat karena pengolahan maupun pemasaran hasil-hasilnya makin mantap.
- 4) Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang makin baik.
- 5) Rasa aman, tentram dan tertib masyarakat semakin luas dan meningkat.

Berikut ini Sasaran ekonomi fundamental pembangunan ekonomi :

- a. Pengurangan angka kemiskinan, jumlah pengangguran, dan ketimpangan.
- b. Peningkatan kesejahteraan rakyat.
- c. Pestabilan laju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Menurut Mubyarto, ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri:

- 1) Dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar.

- 2) Dikelola dengan cara-cara swadaya.
- 3) Bersifat mandiri sebagai ciri khasnya.
- 4) Tidak ada buruh dan tidak ada majikan.
- 5) Tidak mengejar keuntungan.

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Dalam pengertian sistem sosial terkandung unsur:

- a) Tujuan bersama yang menciptakan berbagai kebiasaan, tradisi, kaidah dan aturan yang melembaga untuk melakukan usaha secara bersama.
- b) Seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama tersebut menciptakan pengikat yang mempersatukan anggota masyarakat dalam usaha bersama melalui cara-cara tertentu.
- c) Sikap dasar dan pengertian tentang hak dan kewajiban, yang membentuk pola tingkah laku dan tindakan individu maupun kelompok, satu terhadap yang lain.
- d) Otoritas, kepemimpinan, struktur kebiasaan untuk mengarahkan usaha bersama memilih atau menempatkan alternatif-alternatif bagi alat-alat yang dipergunakan dan mempersatukan seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama menggunakan alat-alat tersebut

Berikut ini adalah beberapa strategi dalam pembangunan ekonomi :

- 1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan terutama di arahkan dalam menciptakan kesempatan kerja produktif, pengembangan kapasitas infrastruktur , dan peningkatan kegiatan ekonomi produktif rakyat.

## 2) Strategi Pengembangan UMKM

Dalam Sistem ekonomi kerakyatan, pengembangan industri pedesaan melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah stratejik dalam pembangunan bangsa.

### **3. Kendala dan Solusi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian desa Pмбуang Hulu**

Berjalannya suatu program atau lembaga ke uangan khususnya simpan pinjam pasti tidak lepas dari kendala, dan memiliki suatu kebijakan solusi untuk mengatasinya. Agar tidak ada yang dirugikan antara dua belah pihak.

Pada dasarnya sistem, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila, dan menunjukan pemihakan sungguh-sungguh pada rakyat yang lemah. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 sebelum di amandemen, semestinya sistem ekonomi kerakyatan harus menjadi landasan dalam setiap perumusan strategi pembangunan dan penetapan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Peneliti menilai kendala yang di alami UPK dalam pelaksanaannya sama seperti lembaga atau program keuangan lainnya, hanya saja yang menjadi berbeda adalah jika terjadi tunggakan dan sudah di berikan surat peringatan



sampai tiga kali, dari pihak upk tidak langsung sampai melelang atau menjual jaminan melainkan, melakukan kesepakatan kembali dengan cara menemui anggota yan bersangkutan, apa masalah dan kendalanya secara musyawarah dengan harapan memperoleh kesepakatan kembali agar anggota membayar sisa pinjaman walaupun meangsur secacra sedikit demi sedikit Rp.100.000 pun tetap di terima oleh pihak pengelola dari upk.

Menurut peneliti jika tidak ada perubahan atau perbedaan setelah melakukan kesepakatan kembali dari anggota, yang bermasalah tidak juga mengangsur kembali sisa pinjaman, sebaiknya pihak pengelola atau upk melakukan lelang saja jaminan pinjaman agar ada efek jera atau menjadi contoh bagi anggota lain dengan tidak mengambil semua hasil penjualan lelang tapi sisa pinjaman saja. Agar permasalahan terselesaikan tidak ada lagi pihak yang dibebankan dalam pelaksanaannya Program UPK di Kecamatan Hanau Desa Pembuang Hulu. Menurut peneliti pihak pengelola harus lebih memperhatikan lagi dari kreteria calon anggota baru yang mengajukan pinjaman.

Selanjutnya dalam hal kendala yang dirasakan oleh anggota atau proses pencairan, di sebabkan oleh faktor dana yang dimiliki upk terbatas, hanya peninggalan dana X PNPM pada tahun 2014, solusinya sebaiknya upk mencari suntikan dana dari pihak ketiga investor lokal ataupun asing untuk meningkatkan kinerja pengelolaan program, supaya proses pencairan lebih cepat dan lebih baik lagi kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Program UPK merupakan sebuah program keberlanjutan dari PNPM Mandiri Perdesaan yang di kelola secara mandiri oleh perangkat desa, masyarakat miskin menjadi prioritas utama dari program upk dalam arti segala keputusan yang di ambil berpihak kepada masyarakat miskin dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Sejak program upk berjalan di kecamatan hanau atau desa Pembuang Hulu, banyak masyarakat lebih memilih mengajukan pinjaman di upk. Dalam proses pelaksanaanya kelompok perempuan juga ikut dilibatkan, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam peranannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.
2. Hasil wawancara dengan objek dan observasi yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa, program Unit Pengelola kegiatan berpengaruh secara langsung, dan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat desa Pembuang Hulu. Khususnya masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah atau miskin, karena UPK lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat miskin. Program UPK berdampak langsung terhadap pengusaha kecil UMKM dari hasil temuan peneliti pengusaha kecil atau UMKM yang

ada di desa Pembuang Hulu, mereka menilai adanya program upk dapat membantu usaha mereka secara langsung, dapat mengajukan pinjaman untuk tambahan modal usaha, di UPK menurut mereka lebih mudah dan tidak dipersulit dalam mengajukan pinjaman, tidak seperti di lembaga keuangan lainnya, asal ada ktp, Kartu keluarga, dan jaminan sudah bisa mengajukan pinjaman.

3. Kendala yang di alami UPK dalam pelaksanaannya sama seperti lembaga atau program keuangan lainnya, hanya saja yang menjadi berbeda adalah jika terjadi tunggakan dan sudah di berikan surat peringatan sampai tiga kali, dari pihak upk tidak langsung sampai melelang atau menjual jaminan melainkan, melakukan kesepakatan kembali dengan cara menemui anggota yang bersangkutan, apa masalah dan kendalanya secara musyawarah dengan harapan memperoleh kesepakatan kembali agar anggota membayar sisa pinjaman walaupun meangsur secacra sedikit demi sedikit Rp.100.000 pun tetap di terima oleh pihak pengelola dari UPK.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang di dapatkan sebagai berikut :

1. Bagi pengelola atau pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebaiknya melakukan perubahan dan peninjauan kembali mengenai akad atau perjanjian yang masih memakai sistem bunga (riba), menurut saran peneliti alangkah baiknya jika sistemnya di rubah menjadi mudharabah (bagi hasil), dalam

islam karena bunga (riba) di haramkan oleh Allah SWT. Al-mudrahabah (bagi hasil) bisa menjadi salah satu solusi untuk bisnis skala kecil, maupun skala besar, baik itu untuk lembaga keuangan maupun program lainnya yang bersangkutan dengan finansial.

2. Bagi Anggota hendaknya mengajukan dan menggunakan pinjaman, bukan untuk keperluan konsumtif tapi untuk keperluan produktif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal, Vol. 10 No.4, 2010

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2007

Cornelis Rintuh, *Miar, Kelembagaan dan Ekonomi rakyat*, Yogyakarta, Cet Pertama BPFE Yogyakarta, 2005

Edy Suhardono, *Teori Peran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994

Fahmy Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*, (Cet. I; Jakarta: Republika, 2008)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002

Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*, Padang, Akademi Permata, 2013

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013

Irham Fahni, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2014

Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1989.

M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz edia, 2016.

Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Beerwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara,Cet 1, 1991.

Rozaini Nasution, *Teknik Sampling*, Universitas Sematera Utara, 2003

Tim Koordinasi PNPM-PPK,*Petunjuk Teknis Operasional*,Jakarta:2007.

Windhu Putra,*Perekonomian Indonesia*,Depok: PT. Raja grafindo 2018

Windy Novia,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko Surabaya,2013

## **B. Skripsi**

Safrizal, *Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Desa Mengkopot Kecamatan Merbabu*, Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2013

Sri Romandoni,*Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Pemberian kredit Mikro dan Perannya Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan di Kecamatan Winong Kabupaten Pati Priode 2009*,Skripsi,Semarang,Universitas Negeri Semarang,2011.

Eliyanti, *Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*,Skripsi,Jakarta,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2012.

Wahdiah, *Pengendalian piutang pada Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan* Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2013.

### C. Internet

Wikipedia, diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Perdesaan#Gambaran\\_Umum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Perdesaan#Gambaran_Umum). Pada tanggal 29 maret 2019 pukul 10:40 WIB

Di akses dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/amp/2018/12/18/pertumbuhan-ekonomi-kalteng-tertinggi-se-kalimantan>. Pada tanggal 10 april 2019 pukul 09:40 WIB

Di akses dari <https://seruyankab.bps.go.id/publication/2018/10/11>. Pada tanggal 10 april 2019 pukul 10:00 WIB

Di akses dari <http://www.kompasiana.com/ratudevi/550ea7e5a33311ae2dba81bb/peranan-pemerintah-dalam-perekonomian>. Pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 14:30 WIB

Di akses dari <https://www.maxmonroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> pada tgl 27 Oktober 2019 10:11 Wib

